

ENEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF

Edisi Juli I Tahun 2021 No. 17

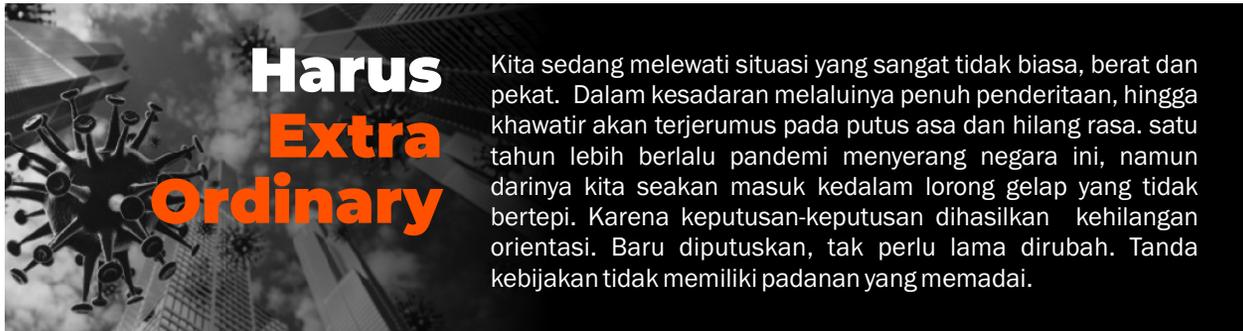
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Dr. H. Salim Segaf Aljufri, MA*

*Anggota Fraksi PKS  
DPR dan DPRD*

**Harus Bantu  
Rakyat Yang  
Kesusahan**



# Harus Extra Ordinary

Kita sedang melewati situasi yang sangat tidak biasa, berat dan pekat. Dalam kesadaran melaluinya penuh penderitaan, hingga khawatir akan terjerumus pada putus asa dan hilang rasa. satu tahun lebih berlalu pandemi menyerang negara ini, namun darinya kita seakan masuk kedalam lorong gelap yang tidak bertepi. Karena keputusan-keputusan dihasilkan kehilangan orientasi. Baru diputuskan, tak perlu lama dirubah. Tanda kebijakan tidak memiliki padanan yang memadai.

Mengawali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada tanggal 3 Juli yang lalu dengan napas 'tersengal'. Bukan karena jumlah korban jiwa yang semakin banyak dan rumah sakit yang penuh, namun juga inkonsistensi dalam penerapannya. Warga Negara Asing masih hilir mudik tanpa dihentikan, lagi-lagi alasannya proyek ambisius negara.

Padahal alasan PPKM darurat diterapkan utamanya karena ada persoalan dengan varian baru covid 19 yang lebih ganas akibat aktivitas mobilitas orang. Lonjakan pasien Covid saat ini diduga bukan sekedar adanya pergerakan kala idul fitri, namun juga 'menggagap remeh' kedatangan virus delta dari tempat asalnya.

Setahun lebih berlalu saat

ini tercatat 584 Ulama di Indonesia meninggal dunia selama pandemi covid 19. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melaporkan sebanyak 401 dokter meninggal dunia karena Covid-19. Fasilitas kesehatan (faskes) yang penuh akibat (faskes) yang penuh akibat kedatangan virus delta dari tempat asalnya. (nakes) semakin berisiko terpapar virus corona. Angka

orang terpapar per tanggal 7 juli 2021 mencapai 2,35 juta, meninggal dunia 61.868 orang. satu hari penambahan harian 728 orang. Angka-angka yang melesat. Entah bagaimana Pemerintah memandang angka-angka ini, hanya sebagai data atau penguat kekuasaan untuk lebih bertanggungjawab.

Kita sedang melewati situasi yang sangat tidak biasa, berat dan pekat. Dalam kesadaran melaluinya penuh penderitaan, hingga khawatir akan terjerumus pada putus asa dan hilang rasa. satu tahun lebih berlalu pandemi menyerang negara ini, namun darinya kita seakan masuk kedalam lorong gelap yang tidak bertepi. Karena keputusan-keputusan dihasilkan kehilangan orientasi. Baru diputuskan, tak perlu lama dirubah. Tanda kebijakan tidak memiliki padanan yang

memadai.

Hari-hari ini jerit derita mearung lebih kencang, berbarengan dengan sirine ambulance yang tidak pernah padam. rumitnya seluruh riuh itu tidak memiliki arti yang luar biasa bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Tetap berpegang teguh bahwa memperkuat pundi ekonomi jauh lebih penting daripada mengerahkan segenap daya dan upaya untuk perbaikan bidang kesehatan.

Penanganan kesehatan lebih banyak terjebak pada prosesi serta atraksi dibanding aksi, hingga akhirnya banyak yang dikremasi karena lamban dalam antisipasi. Vaksinasi berjalan dengan lambat dan cenderung birokratis, maksud hati dijadikan game changer malah jadi game over.

Pada level implementasi Aparat keamanan dan satgas

sibuk mengejar masyarakat, namun lalai menghentikan kedatangan WNA. Berulangkali, berkali-kali dan diproteksi. ironis sekali memang.

Kondisi saat ini butuh jalan keluar yang kaya dengan terobosan. Situasi saat ini tidak bisa diselesaikan dengan sekedar memberi pidato dan kemudian mendelegasikan. Kepemimpinan harus memimpin di depan, dari jarak dekat dan perhatian penuh. extra ordinary approach.

Presiden harus menjadi panglima dari semua tindakan dan penerahan sumber daya. Tak boleh ada panglima yang lain, agar tidak ada dualisme keputusan dan tafsir yang beragam. Segera ambil keputusan strategis dan berikan proteksi maksimal kepada warna negara. orang lain bisa, kenapa kita enggan?

# Rekomendasi Fraksi PKS Untuk Langkah Darurat Menyelamatkan Rakyat

Fraksi PKS DPR RI **merekomendasikan** langkah darurat untuk menyelamatkan rakyat sebagai berikut:

1. Mendesak pemerintah membuka lebih banyak lagi rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan dengan memanfaatkan gedung-gedung pertemuan, gelanggang olah raga, kantor-kantor pemerintahan, dan tempat-tempat lain yang representatif serta memenuhi pasokan kelengkapan standar perawatan covid 19.
2. Mendesak pemerintah menjamin ketersediaan oksigen serta memasok cepat dan tidak boleh telat. Perbanyak pasokan dan stasiun pengisian oksigen, bisa bekerjasama dengan industri.
3. Mendesak pemerintah menjamin ketersediaan obat-obatan pasien covid dan memenuhi pasokan obat-obatan yang diperlukan untuk

pasien covid 19 di berbagai rumah sakit dan apotik-apotik rujukan. Rakyat mengeluhkan sulitnya obat, banyak puskesmas angkat tangan, pemerintah harus cepat bertindak. Usut dan tindak tegas jika ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab menimbun obat dan menjual jauh di atas harga eceran.

4. Mendesak pemerintah merekrut lebih banyak lagi relawan kesehatan untuk melayani pasien covid baik di rumah sakit maupun yang sedang isolasi di rumah atau tempat-tempat isolasi mandiri. Tenaga kesehatan puskesmas dan rumah sakit sudah kuwalahan dan kelelahan menangani pasien yang membludak.

Aleg PKS Bersama Struktur dan Kader **Wajib** Bantu Rakyat

Fraksi PKS secara khusus menyerukan aksi kemanusiaan kepada para aleg PKS pusat dan daerah bersama struktur dan pra kader PKS untuk mengadvokasi pasien covid baik dengan bantuan langsung kebutuhan warga terdampak,

maupun advokasi kelangkaan pasokan oksigen, obat-obatan, dan rumah sakit/fasilitas kesehatan.

"Selain itu, Aleg PKS bersama struktur PKS juga mengaktifkan satgas covid serta menyiagakan dokter-dokter PKS di berbagai daerah untuk membantu warga yang memerlukan konsultasi terutama bagi yang isoman di rumah. Warga juga dapat memanfaatkan ambulance PKS untuk antar jemput pasien maupun jenazah covid. Bahkan PKS juga menyiagakan relawan pemulasaran jenazah covid. Semua untuk membantu sistem kesehatan kita yang kowalahan menangani pasien covid 19," pungkas Jazuli.

Ketua Fraksi PKS menyerukan peran total seluruh elemen bangsa di masa darurat covid 19 ini. PPKM darurat harus dilaksanakan secara ketat disiplin untuk sama-sama menekan laju kasus covid sehingga rumah sakit kita tidak kolaps.



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Aleg PKS bersama struktur PKS juga mengaktifkan satgas covid serta menyiagakan dokter-dokter PKS di berbagai daerah untuk membantu warga yang memerlukan konsultasi terutama bagi yang isoman di rumah. Warga juga dapat memanfaatkan ambulance PKS untuk antar jemput pasien maupun jenazah covid”

# PPKM Darurat Diberlakukan, FPKS DPR Minta Pemerintah Bekerja Ekstra Keras Jangan Sampai Sistem Kesehatan Lumpuh

**KUTIPAN**

Jakarta (01/07) — Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta Pemerintah bekerja ekstra keras setelah memutuskan pemberlakuan PPKM Darurat terutama untuk memastikan layanan kesehatan tidak collaps atau lumpuh menghadapi lonjakan pasien covid 19.

Presiden Jokowi memutuskan pemberlakuan PPKM Darurat 3-20 Juli pada hari Kamis, 1/7/2021.

"Kondisi saat ini sangat darurat mengingat sistem kesehatan di berbagai rumah sakit dan layanan kesehatan sudah tidak dapat menampung pasien covid 19. Angka penularan meningkat tajam akibat varian baru corona. Maka tidak ada jalan lain pemerintah memang sewajarnya mengambil langkah darurat ini," kata Jazuli.

Fraksi PKS sejak awal menekankan keselamatan rakyat prioritas utama, maka mengatasi laju pandemi adalah prioritas tertinggi pemerintahan saat ini. Fraksi PKS menerima banyak sekali keluhan masyarakat, permintaan advokasi rumah sakit, dan melihat sendiri rumah sakit kita sudah tidak mampu menangani pasien covid-19, dokter dan paramedis sudah bekerja overtime dan sangat kelelahan.

"Fraksi PKS meminta pemerintah bekerja ekstra keras untuk menolong

masyarakat positif covid dengan memitigasi sistem kesehatan jangan sampai collaps. Termasuk menjaga ketersediaan obat-obatan, bed, dokter, dan tenaga kesehatan. Negara dituntut benar-benar hadir di saat seperti ini," tandas Jazuli.

Di sisi lain, lanjut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini, pemerintah harus memastikan kebijakan PPKM Darurat berjalan efektif di lapangan dengan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan aparat dan satuan pemerintahan hingga tingkat RT serta melibatkan partisipasi elemen masyarakat secara luas.

"Keberhasilan memutus mata rantai penularan covid dengan PPKM Darurat ini tergantung kedisiplinan seluruh masyarakat. Oleh karena itu peran seluruh elemen masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, pemuka, termasuk swasta sangat penting. Sekali lagi disiplin aturan yang ditetapkan adalah kunci," pungkas Jazuli.

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Keberhasilan memutus mata rantai penularan covid dengan PPKM Darurat ini tergantung kedisiplinan seluruh masyarakat. Oleh karena itu peran seluruh elemen masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, pemuka, termasuk swasta sangat penting. Sekali lagi disiplin aturan yang ditetapkan adalah kunci"

## Percepatan Vaksinasi Mendesak

# Wakil Ketua FPKS: Kantor PKS Siap Jadi Tempat Pemberian Vaksin

### KUTIPAN

"Target 2 juta dosis per hari harus segera terealisasi agar kekebalan kelompok bisa cepat terwujud. Pemerintah perlu menemukan cara-cara kreatif untuk mengakselerasi program vaksinasi sebagai game changer yang diharapkan dapat mengendalikan pandemi", kata Netty, Senin (29/06).

Jakarta (28/06) — Pemerintah menargetkan vaksinasi sebanyak 2 juta dosis per hari. Sabtu (26/06/2021), vaksinasi COVID-19 baru mencapai 1,3 juta dosis.

Anggota DPR yang juga Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial Netty Prasetyani meminta pemerintah agar lebih gregat dan kreatif dalam mengejar target tersebut.

"Target 2 juta dosis per hari harus segera terealisasi agar kekebalan kelompok bisa cepat terwujud. Pemerintah perlu menemukan cara-cara kreatif untuk mengakselerasi program vaksinasi sebagai

game changer yang diharapkan dapat mengendalikan pandemi", kata Netty, Senin (29/06).

Kendala program vaksinasi, termasuk kurangnya tempat, kata Netty, harus segera diselesaikan. Politisi perempuan PKS ini menyebut kantor PKS siap jadi tempat pemberian vaksin kepada masyarakat.

"Percepatan vaksinasi ini sangat mendesak, karena masih banyak pihak dan sektor-sektor penting lainnya yang belum terjangkau vaksinasi. Misalnya, calon PMI, guru dan tenaga pendidik serta ibu rumah tangga masih banyak yang belum divaksin.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan partai politik untuk merealisasikan target. Jika diperlukan, kantor-kantor PKS, baik tingkat provinsi ataupun kota kabupaten di seluruh Indonesia siap menjadi tempat pemberian vaksin kepada masyarakat," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, pemerintah harus siap berkolaborasi optimal dengan semua elemen bangsa dalam melawan pandemi.

"Dalam situasi sulit yang dikedepankan adalah prinsip saling membantu dan saling mengingatkan, bukan lagi soal oposisi atau koalisi. Kita menghalangi persatuan dan kesatuan bangsa dalam menanggung dampak bencana kesehatan ini. Masyarakat pun harus didedukasi agar saling menjaga, saling mengingatkan dan bergotong royong dalam mengatasi masalah pandemi, terutama terkait disiplin protokol kesehatan," katanya.



**Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

Percepatan vaksinasi ini sangat mendesak, karena masih banyak pihak dan sektor-sektor penting lainnya yang belum terjangkau vaksinasi. Misalnya, calon PMI, guru dan tenaga pendidik serta ibu rumah tangga masih banyak yang belum divaksin. Pemerintah dapat bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan partai politik untuk merealisasikan target. Jika diperlukan, kantor-kantor PKS, baik tingkat provinsi ataupun kota kabupaten di seluruh Indonesia siap menjadi tempat pemberian vaksin kepada masyarakat,



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**Salim Segaf al Jufri**

@salimsegaf



Retweet @FPKSDPRRI

Seluruh Anggota Fraksi PKS di DPR dan DPRD harus bantu Rakyat yang kesusahan, tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan. Jaga stamina & besarkan hati warga, apapun latar belakangnya.  
[#AksiPKSuntukIndonesia](#) [#PKSpelayanRakyat](#) [@FPKSDPRRI](#)  
[@rofikhananto](#) [@PKSjateng](#) [@pkseropa](#) [@PKSinggris](#)

10.25 PM · 3 Jul 2021 · Twitter for Android

# Aleg PKS: Pemerintah Jangan Kembangkan Otoritarianisme Dimasa Pandemi

## KUTIPAN

Jakarta (29/06) --- Politisi senior, Amien Rais, dalam webinar peringatan 85 tahun B.J. Habibie, yang diselenggarakan LP3ES, Jumat (26/6) mengungkapkan fenomena global yang disebut democratic back sliding menuju otoriter.

Sebelumnya Jimly Asshiddiqie menyebut fenomena tersebut dengan istilah pembajakan demokrasi.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto, mensinyalir Pemerintah memanfaatkan momen wabah pandemi virus Corona (Covid-19) untuk memperkuat kekuasaan.

Pemerintah, kata Mulyanto acap kali beralih untuk menanggulangi pandemi Covid 19 dalam menyusun berbagai peraturan dengan mereduksi peran DPR RI.

Mulyanto yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI

tersebut menilai Pemerintah pimpinan Jokowi harus selalu diingatkan untuk kembali menghormati nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Jangan sampai Pemerintah membajak demokrasi untuk memperbesar kekuasaan.

"Kita merasakan pembajakan itu faktual. Secara umum, saya setuju dengan pandangan Pak Amin Rais tentang democratic back sliding saat Pandemi Covid-19 ini," ujar Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menyebut ada beberapa kasus yang dapat dijadikan contoh. Pertama dalam kasus Perppu No: 1/2020 tentang Covid-19 yang kemudian disah-

kan menjadi UU No: 2/2020.

Dalam Perppu itu Pemerintah secara nyata mereduksi peran DPR terutama dalam fungsi anggaran. Alokasi prioritas anggaran, sesuai konstitusi, yang semula dilaksanakan DPR dengan UU, diubah menjadi kewenangan eksekutif.

Kedua dalam kasus UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Atas nama penanggulangan ekonomi dampak wabah pandemi Covid-19, pembahasan RUU ngebut tidak kenal waktu libur dan waktu reses.

"Meski pembahasan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan tapi pelaksanaan rapat menjadi tidak maksimal dan penuh keterbatasan," ungkapnya.

Sekarang muncul wacana Presiden 3 periode, yang menentang konstitusi. Sementara terkait vaksinasi, Pemerintah menjalankannya dengan pendekatan kekuasaan. Dimana sanksi administratif dan denda menjadi alat pemaksa warga untuk itu vaksinasi,



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**  
Anggota Komisi VII DPR RI

"Pemerintah pimpinan Jokowi harus selalu diingatkan untuk kembali menghormati nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Jangan sampai Pemerintah membajak demokrasi untuk memperbesar kekuasaan. Kita merasakan pembajakan itu faktual. Secara umum, saya setuju dengan pandangan Pak Amin Rais tentang democratic back sliding saat Pandemi Covid-19 ini,"

ketimbang pendekatan edukasi yang persuasive.

Pemerintah juga berencana membubarkan BATAN dan LAPAN, dua lembaga yang dibentuk masing-masing

berdasarkan UU No. 10/1997 tentang Ketenagakuiklan dan UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Anggota FPKS Minta Perpres Sanksi Denda bagi Penolak Vaksin Dicabut, Fokus pada Edukasi Humanis

## KUTIPAN

Jakarta (01/07) — Langkah Pemerintah memberikan sanksi denda kepada masyarakat yang menolak divaksin menuai kritik. Salah satunya datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf.

Bukhori menilai, kendati dalam situasi darurat, manajemen krisis oleh Pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek humanisme.

Politisi PKS ini menambahkan, untuk mencapai kesadaran publik atas pentingnya vaksin bagi kesehatan sekaligus usaha pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tidak sepatutnya pendek akal. Apalagi sampai membahasakan pesan tersebut dengan narasi yang agresif.

"Pada hakikatnya, PKS akan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi sepanjang mengutamakan keselamatan masyarakat dan dilakukan melalui cara-cara yang humanis. Terkait halnya

sanksi denda bagi warga penolak vaksin, sangat disesalkan bahwa kami tidak melihat cara tersebut sebagai metode yang diilhami dari pikiran yang jernih," ungkapnya.

"Masyarakat sudah depresi karena pandemi. Bansos saja dikorupsi. Kini, kembali dibebankan oleh sanksi denda hanya karena menolak vaksinasi? Sementara, vaksin itu bersifat pilihan karena itu hak," ujarnya.

Anggota Komisi Kebencanaan ini menerangkan, dirinya bisa memahami niat baik pemerintah, yakni untuk segera membentuk herd immunity melalui aturan anyar ini (red, Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri

bahwa dirinya juga turut mencermati kondisi gejala sosial dan psikologis masyarakat, utamanya kecemasan dari kelompok masyarakat yang masih ragu terhadap vaksin.

"Secara garis besar ada beberapa alasan utama dari warga yang masih diliputi rasa bimbang. Pertama, masih ada yang mempertanyakan simpang siur kehalalan vaksin. Kedua, soal efek samping serius dari vaksin mengingat ini menyangkut nyawa. Misalnya, beberapa negara di dunia telah melaporkan kasus pembekuan darah setelah vaksinasi sehingga secara fatal berakibat pada kematian. Ketiga, sejauh mana keamanan vaksin dan kepastian pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan," paparnya.

Keterangan politisi dipil Jateng 1 ini senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh University of Maryland dan Facebook yang kemudian dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada 12 Mei 2021. Hasil survei tersebut menyebutkan sejumlah alasan masyarakat yang ragu divaksin mulai dari urutan



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten sedari awal telah menyebabkan kecemasan bagi masyarakat. Desakan kepala daerah maupun para ahli untuk segera menerapkan karantina wilayah selama beberapa waktu ke depan demi membatasi mobilitas warga secara ketat harus dicermati dengan serius oleh Presiden Jokowi. Unsur ini menjadi penting mengingat vaksinasi bukan satu-satunya kunci menanggulangi pandemi

dengan persentase tertinggi. Di antaranya sebanyak 49% karena alasan khawatir efek samping. Kemudian sebanyak 35% dengan alasan menunggu

dan melihat situasi aman, sementara sekitar 7% dengan alasan bertentangan dengan kepercayaan/agama. Selanjutnya di fraksi.pks.id

# PPKM Darurat Jawa-Bali, Politisi PKS Tekankan Pentingnya Pemerintah Menjamin Ketersediaan Pangan

## KUTIPAN

Sumbawa (01/07) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan memberikan respon atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali mulai tanggal 3-20 Juli 2021,

yang berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat dari yang selama ini berlaku.

Menurut Johan, pelaksanaan PPKM Darurat ini pemerintah harus memperhatikan kondisi ketahanan pangan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali.

"Harus ada pantauan dan solusi terhadap tersedianya akses pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena pembatasan transportasi dan kegiatan ekonomi akan mengganggu sistem pangan yang berjalan terutama terkait kelancaran distribusi dan

pasokan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen di seluruh wilayah Jawa Bali", ujarnya.

Johan selaku Anggota Komisi IV DPR RI menandakan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan serta menjaga daya beli petani selama pelaksanaan PPKM Darurat tersebut.

"Saya minta pemerintah menjamin sektor Pertanian tetap berjalan dengan aman dan lancar selama PPKM darurat Jawa Bali demi terjaminnya kecukupan pangan

masyarakat", imbuh Johan.

Johan menandakan bahwa walaupun sektor Pertanian sebagai sektor yang paling tangguh selama masa pandemic namun bukan berarti tidak terdampak.

"Maka kebijakan PPKM Darurat ini harus tegas memberikan jaminan proses produksi dan distribusi produk pertanian dapat berjalan lancar," pungkasnya.

Menurut Johan, pemerintah harus lebih inovatif dalam mengambil kebijakan untuk menumbuhkembangkan kegiatan agribisnis yang sesuai dengan dinamika perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemic ini.

"Sehingga diharapkan PPKM Darurat ini tidak mengganggu proses produksi, pengolahan, transportasi dan distribusi logistik pangan," urai Johan.

Politisi PKS ini mengungkapkan potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat besar terjadi pada masa



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**

Anggota Komisi IV DPR RI

Agar menjadikan sektor pertanian, peternakan, perikanan sebagai pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat korban PHK agar roda ekonomi terus tumbuh. Jadikanlah sektor Pertanian ini sebagai sektor andalan dalam menyerap tenaga kerja demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada masa pandemic ini,

pelaksanaan PPKM Darurat ini maka menurut Johan harus ada perhatian pemerintah.

"Agar menjadikan sektor pertanian, peternakan, perikanan sebagai pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat korban PHK agar roda ekonomi

terus tumbuh. Jadikanlah sektor Pertanian ini sebagai sektor andalan dalam menyerap tenaga kerja demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada masa pandemic ini," ucap Johan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Panja RUU PDP *Deadlock* Aleg PKS: **Tunggu Itikad Baik Kominfo Mau Lanjut atau Tidak**

## KUTIPAN

Jakarta (01/07) — Belum adanya titik temu antara sikap Kominfo yang berkeras untuk menempatkan lembaga otoritas pengawas data pribadi dibawah kementerian dengan sikap Komisi 1 yang menghendaki lembaga tersebut berada di bawah Presiden, menyebabkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengalami deadlock.

Menanggapi hal ini, Anggota Panja PDP, Sukamta menyebut saat ini semua kembali kepada itikad baik Kominfo sebagai representasi pemerintah.

"Lembaga atau badan pengawas data pribadi ini sangat strategis untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi bisa berjalan sesuai standar," ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, ada risiko penyimpangan yang bisa muncul mengingat saat ini data pribadi nilainya sangat mahal.

"Oleh sebab itu lembaga ini semestinya ada di bawah presiden untuk memastikan kewengannya kuat dan mampu

berjalan lebih independen sebagai lembaga pengawas. Kalau berada di bawah Kominfo, saya meragukan nantinya bisa berjalan secara optimal," ungkap Sukamta.

Pertimbangan yang tidak kalah strategis, imbuhnya, adalah agar lembaga pengawas ini setara dengan standar Internasional.

"Yakni setara dengan standar General Data Protection Regulation (GDPR). Kenapa harus standar? Karena kalau kita sesuai, maka data WNI kita di Eropa akan diperlakukan dan diberikan perlindungan oleh GDPR, sementara kalau tidak

independen itu dianggap tidak standar. Saat ini banyak negara melakukan revisi atas Peraturan perlindungan data pribadinya untk diadaptasi dengan GDPR" Imbuhnya

Lebih lanjut anggota Komisi 1 asal PKS ini menyebut pembentukan lembaga atau badan pengawas ini sangat penting karena banyak rujukan teknis tentang kewajiban pengendalian data yang diatur di dalam RUU PDP. Kewajiban ini terkait dengan pengelolaan data pribadi masyarakat yang sangat penting.

"Masyarakat menyerahkan data mereka untuk dikelola, dari data yang bersifat umum hingga bersifat spesifik seperti data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan seksual, pandangan politik hingga data keuangan dan catatan kejahatan. Kesemuanya data yang berharga, itu sebabnya tanggung jawab pengelola data sangat besar. Maka lembaga pengawasnya juga harus memiliki otoritas yang kuat, agar mampu menjadi lembaga kontrol yang efektif," tutup Sukamta.



**H. SUKAMTA, Ph.D.**  
Anggota Komisi I DPR RI

"Masyarakat menyerahkan data mereka untuk dikelola, dari data yang bersifat umum hingga bersifat spesifik seperti data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan seksual, pandangan politik hingga data keuangan dan catatan kejahatan. Kesemuanya data yang berharga, itu sebabnya tanggung jawab pengelola data sangat besar. Maka lembaga pengawasnya juga harus memiliki otoritas yang kuat, agar mampu menjadi lembaga kontrol yang efektif"

# Aleg PKS Dorong KASN Upaya Desentralisasi Pengawasan dan Pembinaan ASN Menjadi Lebih Baik

## KUTIPAN

Jakarta (29/06) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Mardani Ali Sera bersama Prof Siti Zuhro, Dr Anggito Abimanyu, Prof Zuhdan dan Prof Johermansyah hadir dalam RDP Komisi II DPR untuk membahas RUU ASN dalam mewujudkan peningkatan kualitas ASN.

“RUU yang penting karena kita kerap mendengar banyaknya aspirasi para tenaga honorer dan pegawai tidak tetap terkait kepastian waktu pengangkatan mereka jadi ASN serta hak & kewajiban yang melekat di dalamnya,” ujar Mardani dalam akun twitter pribadi @mardanialisera Selasa (29/6).

Politisi PKS ini melanjutkan, dalam RUU ASN seharusnya lebih menekankan pada aspek keadilan, kesejahteraan dan kepastian waktu pengangkatan menjadi PNS serta P3K untuk kehidupan sosial mereka lebih baik.

“@fpksdprri mendukung usulan pasal 22 yang menekankan bahwa P3K memperoleh hak yang sama seperti halnya

PNS,” tegas Mardani.

Mardani menjelaskan, salah satu masalah klasik di Indonesia yakni politisasi serta intervensi birokrasi yang masih kerap terjadi, terutama pasca pilkada. Bahkan, sistem karir masih tergantung pesta demokrasi tersebut. Justru birokrasi besar-besaran sangat tidak efektif & tidak efisien.

“Untuk itu, @fpksdprri sejak awal mendorong pasal 25, pasal 26 ayat (2), pasal 111 dan pasal 120 yang menekankan bahwa dalam rangka reformasi birokrasi, pengisian jabatan-jabatan strategis dilindungi ASN dilakukan dengan sistem merit. “right men on right place” harus terwujud tanpa memandang

latar belakang ras, agama, umur, jenis kelamin dll,” tukas Anggota Komisi II ini.

Lanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus mendapat dorongan agar lebih terlihat. Adanya KASN akan membuat desentralisasi pengawasan & pembinaan ASN menjadi lebih baik, sangat bahaya jika lembaga tersebut dibubarkan.

“Salah satu poin yang saya tanyakan, jika dilihat dari sisi paragdimatik, bisakah kita dalam hal ini memberikan ruang yang lebih besar kepada presiden (karena kita menganut sistem presidensial) untuk mengatur ASN ini? Bukan dalam kerangka politiknya tapi dalam kerangka fungsinya. Contoh, KASN yang ada saat ini sangat ompong makanya dibawah cukup berantakan,” tutur Mardani.

Mardani kembali menuturkan, bagaimana best practice (finlandia, Norwegia, Singapura) peringkat teratas dari segi ease of doing business yang secara mayoritas memiliki birokrasi ringkas, berkualitas, fungsional & profesional.



**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

“Salah satu poin yang saya tanyakan, jika dilihat dari sisi paragdimatik, bisakah kita dalam hal ini memberikan ruang yang lebih besar kepada presiden (karena kita menganut sistem presidensial) untuk mengatur ASN ini? Bukan dalam kerangka politiknya tapi dalam kerangka fungsinya. Contoh, KASN yang ada saat ini sangat ompong makanya dibawah cukup berantakan”



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# SELAMAT HUT KE-75 BHAYANGKARA

1 Juli 2021



Tingkatkan Profesionalisme  
dalam Perlindungan  
dan Pelayanan pada Rakyat

**Habib Aboe Bakar Alhabsyi**

Sekjen DPP PKS

# Aleg PKS **Nilai** Buruknya Penegakan Hukum Penyebab Utama Maraknya Kebakaran Hutan dan Lahan

## KUTIPAN

Jakarta (30/06) --- Panitia Kerja (Panja) pengendalian dan penindakan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Komisi IV DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para akademisi dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Menurut data Greenpeace Asia Tenggara antara tahun 2015 – 2019, terdapat sekitar 4,4 juta hektar lahan telah terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar kawasan ini atau sekitar 18 persen telah berulang kali terbakar.

Salah satu yang menjadi fokus perhatian panja tersebut adalah buruknya penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan yang merupakan penyebab utama masih maraknya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan politisi senior dari Fraksi PKS

drh Slamet saat mengikuti RDPU Komisi IV DPR RI mengenai penangan Karhutla bersama para akademisi dan LSM yang dilakukan secara daring.

Pernyataan Anggota DPR RI dari Kota dan Kabupaten Sukabumi bukannya tanpa alasan, sebab menurut data yang diperoleh selama periode 2015 hingga 2019 setidaknya 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar terbesar belum menerima sanksi apapun meskipun kebakaran tersebut terjadi dalam konsesi mereka.

Selain penegakan hukum

yang lemah, Slamet juga menuding pemerintah secara jelas dan nyata juga melemahkan proses perlindungan lingkungan hidup khususnya pencegahan karhutla dengan merevisi pasal 67 dan menghapus pasal 68 dalam UU 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang memuat kewajiban setiap pelaku usaha untuk membuat pernyataan kesanggupan dalam menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran, sebelum memperoleh izin lingkungan.

"Kami sudah memperingatkan tentang hal ini selama pembahasan UU Cipta kerja, karena jika ketentuan-ketentuan tersebut dihilangkan adalah sebuah langkah mundur bagi perlindungan lingkungan khususnya di areal perkebunan," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/06).

Dari dua pendekatan tersebut, imbuhnya, menunjukkan masih rendahnya komitmen pemerintah dalam mencegah terjadinya karhutla.



**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI

“Meskipun Presiden Jokowi sudah menyatakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2020 lalu bahwa akan terus memperkuat perlindungan lingkungan hidup jika tanpa regulasi yang kuat serta penegak hukum yang masih lemah wacana presiden tersebut hanya akan menjadi sebuah utopia belaka

“Meskipun Presiden Jokowi sudah menyatakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2020 lalu bahwa akan terus memperkuat perlindungan lingkungan hidup

jika tanpa regulasi yang kuat serta penegak hukum yang masih lemah wacana presiden tersebut hanya akan menjadi sebuah utopia belaka,” tutup Slamet.

# Impor Garam Meningkatkan, Politisi PKS Desak Pemerintah Buat Terobosan Pengembangan Garam Rakyat

## KUTIPAN

Sumbawa (25/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyesalkan rencana pemerintah untuk melakukan impor garam mencapai 3,07 juta ton pada tahun ini

bahkan pada kuartal 1 tahun 2021 ini menurutnya terjadi peningkatan impor garam sebesar 19,6% dibanding kuartal 1 tahun 2020 lalu.

Keputusan pemerintah ini, kata Johan, sangat tidak berpihak pada kepentingan petambak garam kita, hal ini sangat disayangkan apalagi daya dukung anggaran yang disiapkan untuk pengembangan garam nasional tahun 2022 nanti hanya sebesar Rp 39 miliar.

"Terus terang saya mempertanyakan dimana komitmen pemerintah terhadap nasib nelayan, pembudidaya dan petambak garam kita," tutur Johan.

Politisi PKS ini menegaskan bahwa amanat UU

No. 7 tahun 2016 telah menegaskan agar Pemerintah memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

"Namun hingga kini belum terlihat terobosan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam nasional demi membela kondisi petambak garam kita yang menjerit dalam situasi pandemi ini," ujar Johan

"Saya minta tahun 2021 ini ada Langkah jelas dari pemerintah seperti mendorong industri agar menyerap garam lokal secara optimal, memperbanyak bantuan integrasi lahan, peningkatan

saluran/jalan produksi, pembangunan pabrik pemurnian/pencucian garam serta pembangunan Gudang garam rakyat," ujar Johan menambahkan.

Johan menandakan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hendaknya memperkuat sinergitas dari hulu sampai hilir pergaragaman nasional dengan pembentukan sentra ekonomi garam rakyat dan diperlukan regulasi khusus mengenai roadmap pembangunan pergaragaman nasional.

"Saya minta kebijakan pergaragaman nasional dapat menyentuh permasalahan utama yang mendasar yaitu pemberdayaan garam rakyat dan pembangunan industri garam nasional yang kokoh dan mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Jadi tolong agar pemerintah menghentikan merancang peningkatan impor garam setiap tahun", tegas Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini meminta pemerintah berperan



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya menilai kebijakan pemerintah saat ini tidak menguntungkan petambak garam, mereka dihadapkan pada situasi sulit dan terpuruk karena harga jual yang rendah di tingkat tambak garam atau di Gudang, hal ini berakibat produksi garam di Indonesia tidak berkembang, sementara di sisi lain kebutuhan akan garam terus meningkat setiap tahun,"

meningkatkan taraf hidup petambak garam melalui peningkatan produktivitas lahan sehingga kualitas garam lokal dapat meningkat.

"Saya selalu berharap pemerintah dapat memperha-

tikan kepentingan para petambak garam melalui penyerapan garam petani dan mesti ada larangan impor di saat panen raya garam," harap Johan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Food Estate Digarap Empat Kementerian, Aleg PKS Ingatkan Jangan Ada Tumpang Tindih Anggaran

## KUTIPAN

Padang (24/06) — Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto mengungkapkan program Food Estate muncul di beberapa kementerian,

antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertahanan.

Hermanto mengingatkan Pemerintah agar dalam realisasinya nanti jangan sampai terjadi tumpang tindih program yang mengakibatkan terjadinya anggaran ganda.

"Guna menghindari anggaran ganda, program food estate yang digarap oleh masing-masing kementerian tersebut harus ada segmentasi bidang garap dan lahan yang tegas dan jelas. Intinya batas kerja masing-masing kementerian harus jelas," papar

Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Pemerintah, lanjut Hermanto, hendaknya hati-hati dalam mengalokasikan anggaran pada program food estate untuk menghindari terjadinya inefisiensi anggaran.

"Pemerintah perlu menetapkan titik tolak dan ukuran kinerja sebagai tolak ukur bagi setiap kementerian yang menggarap program food estate. Hal tersebut penting agar nanti tidak terjadi saling klaim antar kementerian," tutur legislator dari FPKS DPR ini.

Hermanto khawatir terjadi pemborosan terhadap anggaran besar pada program food estate yang tersebar di beberapa kementerian tersebut.

"Padahal negara sedang membutuhkan anggaran yang besar juga untuk keperluan mengatasi pandemi covid-19," ucapnya.

Ditengah kondisi pandemi ini, Hermanto minta Pemerintah agar melakukan koordinasi antar kementerian yang menggarap program food estate.

"Koordinasi untuk melakukan sinergi, penyalarsan serta paduserasi guna menetapkan batasan yang jelas dan tegas terhadap apa yang menjadi bidang garap masing-masing dalam rantai program food estate," jelasnya.

"Koordinasi yang berkelanjutan sangat penting guna memastikan program food estate dapat mencapai target yang diharapkan yaitu ketersediaan pangan dalam negeri dan membangun kedaulatan pangan," pungkask legislator dari Dapil Sumbar I ini.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"Guna menghindari anggaran ganda, program food estate yang digarap oleh masing-masing kementerian tersebut harus ada segmentasi bidang garap dan lahan yang tegas dan jelas. Intinya batas kerja masing-masing kementerian harus jelas. Pemerintah hendaknya hati-hati dalam mengalokasikan anggaran pada program food estate untuk menghindari terjadinya inefisiensi anggaran."



PKS



**Akun Facebook Official  
Fraksi PKS DPR RI**

**BERPINDAH**

dari **Fraksi PKS DPR RI**  
menjadi

**FPKS DPR RI**



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@fpksdprri



PKS TV DPR RI

# Aleg PKS Harap **Optimalisasi Venue** Pasca PON XX Papua

**KUTIPAN**

Tasikmalaya (23/06) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menyelesaikan pembangunan 3 venue tambahan di Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Papua di sisa waktu ini agar tetap memperhatikan mutu dan kualitas.

"Saya Ingatkan Kepada Kementerian PUPR, tiga venue tambahan yang masih dalam tahap pembangunan yakni venue sepatu roda, dayung, dan panahan dapat selesai sesuai target akhir Juli 2021. Berupaya kerja lebih giat lagi, tapi kualitas harus dijaga," ujar Politisi PKS ini.

Dimasa Pandemi seperti ini, Toriq yakin dengan kerjasama yang baik dari semua Pihak yakni Pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX di Papua pada 2 - 15 Oktober nanti akan berjalan dengan aman, lancar, sukses prestasi dan sukses penyelenggaraannya.

"Saya optimis dengan tekad dan semangat yang sama antara Pemerintah Daerah dan

semua elemen masyarakat maka pelaksanaan Pon XX Papua di bulan Oktober nanti bakal berjalan lancar, aman dan sukses," ungkapnya.

Berikutnya Toriq mengharapkan ada optimalisasi venue atau tempat pertandingan dan berbagai aset fisik seusai penyelenggaraan Pon XX Papua. Selain tiga venue tambahan, ada empat venue utama yakni arena Aquatic, Istora Papua Bangkit, venue Cricket dan lapangan Hockey, keempatnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

"Saya berharap usai penyelenggaraan PON XX Papua nanti, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan jumlah pengunjung dan ada

pengelolaan yang bagus terhadap tujuh buah venue tersebut," katanya.

Toriq mengatakan sebagaimana yang disampaikan Kepala Bapennas periode lalu bahwa Indonesia bisa belajar dari Sydney, Beijing, dan London yang telah sukses melakukan optimalisasi venue atau tempat pertandingan maupun aset fisik lainnya setelah menjadi tuan rumah olimpiade.

"Saat ini, bekas tempat penyelenggaraan Olimpiade Sydney 2000 menjadi tempat tinggal dan komersial, bekas tempat pertandingan Olimpiade Beijing 2008 menjadi destinasi wisata dan pusat pelatihan atlet serta bekas tempat pertandingan Olimpiade London 2012 dikelola manajemen khusus," ungkapnya.

Toriq juga menambahkan bahwa pemanfaatan 'venue' olahraga juga bisa dilakukan untuk aktivitas lain di luar olahraga, yaitu untuk MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibition).

"Optimalisasi ini juga telah dilakukan oleh Pemprov DKI dan Pemprov Sumsel terhadap Venue Asian Games, diantaranya membuat proyek percontohan untuk 'Sport Tourism'," tutup Toriq.

**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi V DPR RI

"Sebagaimana yang disampaikan Kepala Bapennas periode lalu bahwa Indonesia bisa belajar dari Sydney, Beijing, dan London yang telah sukses melakukan optimalisasi venue atau tempat pertandingan maupun aset fisik lainnya setelah menjadi tuan rumah olimpiade. Saat ini, bekas tempat penyelenggaraan Olimpiade Sydney 2000 menjadi tempat tinggal dan komersial, bekas tempat pertandingan Olimpiade Beijing 2008 menjadi destinasi wisata dan pusat pelatihan atlet serta bekas tempat pertandingan Olimpiade London 2012 dikelola manajemen khusus

# Legislator PKS Sesalkan Persoalan *Manifest* Selalu Berulang dalam Kecelakaan Kapal

## KUTIPAN

Jakarta (01/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo menyesalkan kesimpangsiuran manifest penumpang KMP Yunicee.

Menurut Sigit, ketidakjelasan manifest tersebut merupakan kesalahan berulang yang kerap terjadi dalam kecelakaan pelayaran di tanah air dan sangat merugikan

"Persoalan manifest yang amburadul ini selalu berulang setiap ada kecelakaan pelayaran. Sepertinya tidak pernah ada perbaikan. Padahal, sekarang sistemnya sudah online semua dan manifest ini adalah salah satu dokumen yang harus diperiksa sebelum syahbandar memberikan port clearance." Kata Sigit.

Seperti diketahui, dalam manifest KMP Yunicee, ada 41 penumpang dan 16 anak buah kapal (ABK). Sehingga total manifest berjumlah 57 orang. Namun, hingga Rabu, korban yang berhasil ditemukan

berjumlah 59 orang dan masih ada 11 korban korban hilang yang dilaporkan pihak keluarga dan masih dalam proses pencarian.

Terkait permasalahan manifest penumpang yang selalu berulang, Sigit meminta Kemenhub untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dalam sistem pencatatan dokumen manifest yang dilakukan oleh operator pelabuhan yang bertanggungjawab mencatat data penumpang dan muatan kapal.

Kesimpangsiuran data manifest, kata Sigit, akan sangat merugikan korban dan mempersulit proses pencarian dan pertolongan. Korban yang tidak terdata didalam manifest akan sulit mengklaim ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan

barangnya akibat kecelakaan, termasuk biaya perawatan. Dan untuk korban yang meninggal, ahli waris akan sulit mendapatkan santunan.

"Saya prihatin dengan nasib korban KMP Yunicee yang tidak terdaftar dalam manifest, mereka dan ahli warisnya akan sulit mendapatkan santunan dan biaya perawatan. Ini harus dicarikan jalan keluar oleh regulator," Kata Sigit.

Sesuai dengan pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

Tanggung jawab tersebut dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau kerugian pihak ketiga.

"Operator harus



**Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO**

Anggota Komisi V DPR RI

"Ketidajelasan manifest tersebut merupakan kesalahan berulang yang kerap terjadi dalam kecelakaan pelayaran di tanah air dan sangat merugikan korban. Persoalan manifest yang amburadul ini selalu berulang setiap ada kecelakaan pelayaran. Sepertinya tidak pernah ada perbaikan. Padahal, sekarang sistemnya sudah online semua dan manifest ini adalah salah satu dokumen yang harus diperiksa sebelum syahbandar memberikan port clearance

bertanggung jawab soal pemberian ganti rugi ini. Tidak ada alasan bagi perusahaan pelayaran untuk menghambat atau tidak membayar ganti rugi,

karena semua sudah diarsuransikan dan menjadi kewajiban operator sebagaimana diatur dalam UU," Kata Sigit.

# Anggota FPKS Dukung Audit Investigasi dan Restrukturisasi Utang Garuda

KUTIPAN

Surabaya (23/06) — Pemerintah harus bergerak cepat dalam penyelamatan PT Garuda Indonesia agar tidak terperosok lebih dalam.

Dua langkah yang harus digesa adalah audit investigasi dan restrukturisasi utang melalui renegosiasi dengan lessor atau perusahaan yang menyewakan pesawat.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menanggapi polemik pilihan opsi penyelamatan Garuda dari empat opsi yang disodorkan pemerintah.

Utang perseroan, kata Amin, yang kini mencapai Rp 70 triliun dan diperkirakan bertambah Rp 1 triliun setiap bulannya, akan membuat Garuda Indonesia sulit bertahan jika strategi penyelamatannya dibiarkan berlarut-larut.

“Menteri Erick harus bergerak cepat dan tidak ragu membentuk tim restrukturisasi

andal dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi Garuda,” tegasnya.

Utang jumbo yang melilit Garuda Indonesia diduga kuat akibat mark up, baik harga maupun jumlah pesawat dalam proses pengadaan armada pesawat di maskapai pelat merah tersebut. Seperti dituturkan Direksi Garuda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Senin (21/6/2021) biaya sewa pesawat Garuda itu dua kali lebih mahal dari biaya standarnya.

“Saya mendesak agar ada konsekuensi hukum atas dugaan mark up yang dilakukan manajemen Garuda di era-era sebelumnya. Karena itu BPK harus melakukan audit

investigasi secara independen dan profesional untuk menemukan masalah yang melilit Garuda” ujar Amin.

Konsekuensi hukum terhadap manajemen lama harus ditegakkan karena akibat moral hazard yang dilakukan sangat merugikan negara dan membuat Garuda sebagai maskapai kebanggaan nasional didera masalah seperti sekarang. Harus ada efek jera terhadap manajemen BUMN-BUMN lain di masa lalu dan juga menjadi peringatan bagi manajemen BUMN di masa yang akan datang.

Selain manajemen lama Garuda, sanksi juga harus diberlakukan kepada Akuntan Publik jika terbukti telah bermain mata atau melanggar kode etik dalam proses audit. Termasuk sanksinya dimasukkan dalam daftar hitam auditor bermasalah.

Sementara itu, terkait restrukturisasi dan regenerosiasi, manajemen Garuda saat ini memang berhasil menegosiasiasi biaya sewa sebesar 30%-nya sehingga ada penghematan US \$11 juta per bulan, namun itu belum cukup.

Negosiasi juga perlu dilakukan terkait jumlah pesawat yang disewa, dari jumlah 142 pesawat yang ada, dengan kondisi market size atau kapasitas penumpang saat ini hanya diperlukan 41 pesawat saja.

“Harus ada renegosiasi. Ini harus konyol karena Garuda harus berdarah-darah untuk



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Saya mendesak agar ada konsekuensi hukum atas dugaan mark up yang dilakukan manajemen Garuda di era-era sebelumnya. Karena itu BPK harus melakukan audit investigasi secara independen dan profesional untuk menemukan masalah yang melilit Garuda”

membiayai 101 pesawat yang sebetulnya tidak dibutuhkan, baik biaya sewa maupun perawatannya,” ujar Amin.

Perampingan jumlah pesawat sangat mendesak agar Garuda tidak terus menerus dibebani utang akibat biaya sewa maupun denda yang harus dibayarkan.

Amin pun menyarankan agar perampingan tetap dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan meski market size sudah mulai normal agar Garuda memperoleh windfall dari efisiensi yang dilakukan untuk memulihkan kondisi keuangannya.

# RDP dengan Bappebti, Aleg PKS: Perlu Koordinasi ke Banyak Pihak Termasuk MUI Terkait Kripto

## KUTIPAN

Jakarta (30/06) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina mengatakan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka) bahwa bahasan ini banyak hal sensitif dan menghadapi banyak risiko di kemudian hari terutama bahasan perdagangan aset kripto.

"Meski kripto ini dimana dikenal luas dengan Cryptocurrency atau mata uang kripto sudah ada sejak tahun 1998 yang digagas oleh Wei Dai, namun hingga saat ini sistem kripto hanya segelintir orang yang tau apalagi memahami. Pada awal munculnya sistem ini tahun 1998, kripto belum dapat diimplementasikan karena pengguna bisa menduplikasi mata uang karena tidak ada yang mencatat transaksi", tutur Nevi.

Nevi menambahkan, meski kini sistem kripto telah berkembang pesat, karena mampu dengan sangat kuat untuk mengamankan transaksi

keuangan, memverifikasi transfer aset, dan mengontrol perciptaan unit tambahan, tetapi Bappebti harus memperketat pengawasan transaksi perdagangan aset kripto serta merumuskan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat terkait pembukaan bursa aset kripto.

Politisi PKS ini mengatakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dalam melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan,

dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Keberadaan BAPPEBTI dijamin dalam Undang-undang No 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Saat ini baru sekitar 0,5% hingga 1% penduduk Indonesia yang melakukan investasi trading industri ini (perdagangan berjangka komoditi), akan tetapi Pemerintah harus tetap memberikan perhatian terhadap industri ini", tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan, BAPPEBTI perlu berkomunikasi dengan banyak pihak termasuk MUI ketika akan menyusun regulasi khusus tentang kripto. Selain ini merupakan hal baru bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, juga mesti ada sosialisasi yang perlahan sehingga tidak menimbulkan gejala di masyarakat. Semua aturan dan penerapannya harus bertujuan untuk kabaikan bagi masyarakat banyak.

"Saya mengingatkan kepada pembuat regulasi, berkaitan dengan kripto ini, mesti ada aturan yang kuat melindungi rakyat. Koordinasi



**Hj. NEVI ZUAIRINA**

Anggota Komisi VI DPR RI

“Saya mengingatkan kepada pembuat regulasi, berkaitan dengan kripto ini, mesti ada aturan yang kuat melindungi rakyat. Koordinasi antar lembaga, koordinasi dengan Kementerian mesti dilakukan BAPPEBTI agar regulasi yang terbentuk benar-benar mengakar dan mudah di terapkan semua stake holder”

antar lembaga, koordinasi dengan Kementerian mesti dilakukan BAPPEBTI agar regulasi yang terbentuk benar-benar mengakar dan mudah di terapkan semua stake holder. Kripto jangan sampai jadi alat

investasi yang menimbulkan spekulasi dan permainan untung rugi. Kripto arahkan sebagai alat transaksi, bukan alat permainan untung rugi bisnis”, tutup Nevi Zuairina.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# Selamat

Kepada Bapak

**M. Arsjad Rasjid P.M.**

Yang terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Periode 2021-2026 melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII, pada Kamis, 1 Juli 2021.

Semoga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya..

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

# Tolak Dua Pasal RUU Energi Baru Terbaru, PKS: PLN Bisa Bangkrut

## KUTIPAN

Jakarta (02/07) --- Fraksi PKS DPR RI menolak dua pasal dalam RUU Energi Baru Terbaru (EBT) pada Rapat Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan Komisi VII DPR RI, Kamis (1/7/2021).

Dua pasal itu adalah Pasal 40 yang terkait dengan kewajiban PLN untuk membeli listrik EBT dan Pasal 51 yang terkait dengan subsidi selisih harga antara listrik EBT yang ditawarkan terhadap biaya pokok pembangkitan (BPP).

PKS menilai ketentuan kewajiban pembelian listrik oleh PLN dalam feed in tariff (FIT) alias subsidi selisih harga terhadap BPP (biaya pokok pembangkitan) PLN dalam penentuan harga jual listrik pembangkit swasta kepada PLN, kurang tepat.

Sebab ketentuan ini secara langsung akan menekan keuangan Negara dan lebih memihak kepada produsen listrik swasta (IPP). Apalagi saat ini keuangan negara sudah terkuras untuk biaya penanggulangan pandemi Covid-19.

"Sementara di sisi lain

keuangan PLN juga berkembang dengan beban utang mencapai Rp. 500 triliun. Kalau kewajiban tersebut bersifat obligatif maka PLN akan bangkrut dan hanya akan menghasilkan listrik yang mahal untuk masyarakat. Masyarakat senang dengan listrik yang bersih dari sumber EBT ini namun listrik yang murah masih sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto.

Mulyanto menambahkan untuk EBT berdaya kecil dan berada di daerah pedalaman, dimana EBT adalah satu-satunya sumber energi listrik, maka menjadi wajar dan masuk akal kalau negara mensubsidi listrik EBT ini. Namun untuk listrik EBT berdaya menengah dan besar, sudah seharusnya didorong mekanisme yang lebih

kompetitif dan sehat untuk pengusaha listrik swasta ini.

"PLN akan bangkrut, kalau setiap listrik swasta yang mahal wajib dibeli PLN. Kita kan tahu siapa pemilik pembangkit listrik swasta tersebut," ungkapnya.

PKS memandang, kewajiban pembelian listrik oleh PLN tidak bisa serta-merta tetapi harus tetap mempertimbangkan keekonomian yang berkeadilan. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan PLN, keberlangsungan penyelenggaraan ketenagalistrikan, serta memperhatikan keselarasan supply dan demand, ketersediaan sumberdaya energi setempat, serta tingkat keekonomian sesuai dengan biaya pokok pembangkitan (BPP) sesuai hasil lelang yang adil.

"Sumber EBT yang lain harus belajar dari sumber energi surya (PLTS), yang bersama perkembangan teknologi dan ekosistem bisnis yang baik, harganya terus turun," demikian kata Mulyanto.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

"Kewajiban pembelian listrik oleh PLN tidak bisa serta-merta tetapi harus tetap mempertimbangkan keekonomian yang berkeadilan. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan PLN, keberlangsungan penyelenggaraan ketenagalistrikan, serta memperhatikan keselarasan supply dan demand, ketersediaan sumberdaya energi setempat, serta tingkat keekonomian sesuai dengan biaya pokok pembangkitan (BPP) sesuai hasil lelang yang adil."

# Isu Pemblokiran Rp 500 M Bantuan Pesantren dan Madrasah, HNW Minta Kemenag dan Kemenkeu Koordinasi

## KUTIPAN

Jakarta (01/07) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong agar isu pemblokiran Rp 500 M anggaran bantuan untuk Madrasah dan Pesantren segera bisa diselesaikan. Menurut Kemenkeu permasalahannya karena belum terpenuhinya kelengkapan administrasi.

Bila benar demikian, menurut Hidayat, maka Kementerian Agama agar segera memenuhi kelengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh Kemenkeu untuk mencairkan anggaran bantuan operasional Pesantren dan Madrasah dalam menghadapi Covid-19 tahun anggaran 2020.

Hal ini menyusul pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Komisi VIII DPR-RI (26/6/2021) dan Ketua DPD RI (28/6/2021) bahwa ada dana bantuan pesantren ditahan senilai Rp 500 Miliar.

"Adapun staff khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam keterangannya (30/6/2021) menyampaikan bahwa penundaan tersebut terjadi karena masalah administrasi dan saat ini Dirjen Pendidikan Islam Kemenag dan Dirjen Anggaran Kemenkeu sudah bertemu untuk menyepakati solusi bersama," urainya.

Hidayat mendesak kerja sama Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan tersebut semakin dimatangkan dan ditingkatkan agar proses

pencairan dana BOP yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut bisa dipercepat.

Hal ini, imbuhnya, dalam rangka menunaikan kewajiban negara terhadap lembaga pendidikan Islam yang mengalami berbagai kesulitan akibat pandemi covid-19.

"Penting bagi Kemenag dan Kemenkeu agar meningkatkan koordinasi dan segera melaksanakan keputusan yang kabarnya sudah diambil bersama antara Dirjen Pendis dan Dirjen Anggaran, supaya Pesantren-Pesantren dan Madrasah-Madrasah yang berhak namun belum menerima bantuan akibat kendala administrasi, segera memperolehnya sekalipun sudah sangat telat waktunya," disampaikan Hidayat dalam keterangannya, Kamis(01/07).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Penting bagi Kemenag dan Kemenkeu agar meningkatkan koordinasi dan segera melaksanakan keputusan yang kabarnya sudah diambil bersama antara Dirjen Pendis dan Dirjen Anggaran, supaya Pesantren-Pesantren dan Madrasah-Madrasah yang berhak namun belum menerima bantuan akibat kendala administrasi, segera memperolehnya sekalipun sudah sangat telat waktunya."

Banyak Nakes Terpapar Covid-19,

# Aleg PKS: Pemerintah Harus Berempati dengan Membuat Kebijakan Pro Nakes

## KUTIPAN

Jakarta (27/06) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani meminta pemerintah dan masyarakat berempati kepada tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan Covid-19.

"Pemerintah harus memberi perhatian dan empati kepada tenaga kesehatan, karena merekalah yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Pastikan semua hak mereka terpenuhi, baik menyangkut perlindungan dan keamanan diri, kesehatan, jam kerja hingga soal insentif yang telah dijanjikan," kata Netty dalam keterangan media, Sabtu (26/06/2021).

Menurut Netty, empati kepada nakes harus dibangun, sebab, seiring lonjakan kasus COVID-19 banyak nakes yang mengalami kelelahan, minim istirahat, terpapar COVID-19, meninggal dan bahkan mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari pasien atau keluarga pasien.

"Pemerintah harus surplus empati pada kondisi yang tengah dihadapi tenaga kesehatan. Jangan sampai ada kebijakan yang tidak pro nakes, seperti penundaan insentif, waktu dan beban kerja yang berlebihan, APD minim serta kurangnya suplay obat-obatan dan alkes. Kondisi itu menyulitkan nakes dalam menjalankan tugasnya dan menjadi indikasi adanya defisit empati," ujarnya.

Data di Laporan Covid-19 menunjukkan, jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang meninggal karena COVID-19 hingga Selasa (22/06/2021) mencapai 974 orang. Sebagian besar nakes meninggal adalah dokter sebanyak 374 orang, perawat 311 orang, bidan 155 orang, disusul beragam profesi

nakes lain. Jumlah nakes meninggal dunia di bulan Mei - Juni ini mengalami kenaikan.

"Meninggalnya satu orang tenaga kesehatan menjadi kehilangan besar bagi dunia kesehatan Indonesia dan berimplikasi buruk terhadap penanganan Covid-19. Apalagi saat ini kita menghadapi lonjakan kasus dengan virus varian baru yang lebih ganas dan mudah menular," papar Netty.

Perhatian dan empati kepada nakes, kata Netty, juga harus ditunjukkan oleh masyarakat luas.

"Tunjukkan empati pada nakes yang sedang berjibaku menangani pasien dengan disiplin prokes di mana saja. Jika masyarakat abai prokes, maka kasus akan terus melonjak dan beban nakes makin bertambah. Padahal nakes juga memiliki keluarga dan kehidupan pribadi yang harus dilindungi. Bersikap santun dan sabar dalam antri pelayanan juga akan sangat membantu tugas nakes," paparnya.

Selain itu, kata Netty,



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

**"Tunjukkan empati pada nakes yang sedang berjibaku menangani pasien dengan disiplin prokes di mana saja. Jika masyarakat abai prokes, maka kasus akan terus melonjak dan beban nakes makin bertambah. Padahal nakes juga memiliki keluarga dan kehidupan pribadi yang harus dilindungi. Bersikap santun dan sabar dalam antri pelayanan juga akan sangat membantu tugas nakes"**

insentif terhadap nakes harus segera ditunaikan.

"Jangan ditunda-tunda dan terlambat pencairannya. Insentif itu adalah hak mereka yang wajib diberikan.

Besarannya belum tentu setimpal dengan pengorbanan waktu, keringat, air mata dan bahkan nyawa dalam membantu penanganan pasien COVID-19," katanya.

# PKS Desak Pemerintah Bayar Tagihan Rp 2,56 T Ke 909 Rumah Sakit Covid-19

## KUTIPAN

Jakarta (28/06) --- Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera membayar utang ke semua rumah sakit yang menangani Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tercatat tunggakan tagihan Kementerian Kesehatan terhadap klaim rumah sakit atas tagihan penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 2,56 triliun.

Jumlah tersebut untuk 909 rumah sakit, dan koreksi lebih bayar senilai Rp 706 milyar pada 258 rumah sakit.

"Di tengah situasi berat seperti ini, pemerintah wajib segera membayar piutangnya pada semua RS," tegas Mufida kepada Kantor Berita Politik

RMOL, Senin (28/6).

Dia menambahkan, saat ini seluruh rumah sakit membutuhkan biaya operasional yang sangat besar dan meminta pemerintah untuk tidak menambah beban rumah sakit.

"Saat ini RS sedang membutuhkan biaya operasional sangat besar untuk melayani pasien Covid-19 yang terus bertambah dan juga pasien non Covid-19," tandasnya.



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Di tengah situasi berat seperti ini, pemerintah wajib segera membayar piutangnya pada semua RS. Saat ini RS sedang membutuhkan biaya operasional sangat besar untuk melayani pasien Covid-19 yang terus bertambah dan juga pasien non Covid-19,"

# DPR Minta Nadiem Tak Paksakan Pembelajaran Tatap Muka

## KUTIPAN

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, menilai jika PTM dipaksakan di tengah kasus COVID-19 yang sangat tinggi, bisa berdampak negatif. Maka dari itu, ia meminta agar Nadiem mampu mengambil keputusan yang bijak dengan menunda PTM. Beberapa daerah mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang cukup parah, sehingga jika resikonya tinggi lebih baik ditunda sampai kondisi memungkinkan.

Jakarta (30/06) — Angka kasus COVID-19 saat ini masih sangat tinggi. Bahkan termasuk yang terparap adalah anak-anak. Untuk itu, keinginan pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim, untuk melaksanakan pembelajaran Tatap Muka atau PTM pada bulan Juli 2021, diminta ditinjau lagi.

Anggota Komisi IX DPR RI

Alifudin, menilai jika PTM dipaksakan di tengah kasus COVID-19 yang sangat tinggi, bisa berdampak negatif. Maka dari itu, ia meminta agar Nadiem mampu mengambil keputusan yang bijak dengan menunda PTM. Beberapa daerah mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang cukup parah, sehingga jika resikonya tinggi lebih baik ditunda sampai kondisi memungkinkan.

"Baiknya ditunda dulu

sampai dengan kasus mereda. Namun dilihat juga situasi setempat. Kalau di anggap aman silahkan (belajar) offline. Tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan dikembalikan ke Pemda setempat," kata Alifudin kepada VIVA, Senin 28 Juni 2021.

Namun jika memang kementerian tetap memaksakan ingin menggelar PTM, tentunya harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sekolah juga dituntut untuk melakukan persiapan yang matang, sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka.

"Kalau ada offline kemungkinan para siswa ada kemungkinan terkena virus Corona, perlunya diingatkan terus selalu protokol kesehatan," ujar Alifudin.

Dengan kondisi COVID-19 yang melonjak tajam, dinilai tidak tepat untuk memaksakan pembelajaran tatap muka.

Sebaiknya PTM dilakukan jika kasus COVID-19 sudah mereda.

"Pendapat kami adalah kalau sampai dengan Juli kasus belum mereda sebaiknya di tunda saja. Namun pemda bisa menilai sekolah-sekolah mana saja yang boleh offline di disesuaikan dengan daerahnya," jelasnya.



## H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

“Baiknya ditunda dulu sampai dengan kasus mereda. Namun dilihat juga situasi setempat. Kalau di anggap aman silahkan (belajar) offline. Tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan dikembalikan ke Pemda setempat”

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*



# Meski Anak Sudah Divaksinasi, Aleg PKS Ingatkan PTM Jangan Tergesa

## KUTIPAN

Jakarta (01/07) — Kabar gembira berhembus dengan keluarnya rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) akhir Juni lalu terkait vaksin yang sudah dapat diberikan pada anak usia 12-17 tahun.

Meski demikian anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, mengingatkan pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Pemerintah Daerah untuk tidak tergesa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

"Kabar bahwa vaksinasi sudah dapat dilakukan pada anak usia 12-17 ini tentu merupakan satu kabar baik yang patut kita syukuri. Namun, kita harus ingat, hal ini jangan menjadikan kita lengah dan menyepelekan ancaman Covid-19. Termasuk dalam hal rencana pembelajaran tatap muka jangan kemudian jadi 'digampangin' karena merasa semua sudah terlindungi dengan vaksin," pesan Ledia.

Rekomendasi IDAI menyatakan anak usia 12 hingga 17 tahun di Indonesia sudah dapat divaksinasi menggunakan vaksin sinovac mengingat sudah ada hasil uji klinik fase 1 dan 2 pada anak rentang usia 3-17 tahun di negeri asalnya (China) dengan hasil aman dan vaksin ini sudah tersedia di Indonesia sehingga memungkinkan untuk diberikan. Pemilihan prioritas usia 12-17 tahun diambil mengingat pada usia ini tingkat mobilitas anak cenderung tinggi dan sudah mampu menyampaikan keluhan KILI bila ada.

"Di tengah upaya pemerintah menekan laju pandemi Covid-19, kabar ini tentu memberikan sedikit rasa sukacita mengingat pemberian vaksinasi merupakan salah satu

jalan ikhtiar untuk memberikan perlindungan masyarakat dari terpapar dan mengalami efek berat dari Covid-19. Sayangnya masih ada beberapa pemahaman keliru di tengah masyarakat bahwa sudah divaksinasi artinya sudah kebal hingga protokol kesehatan pun terabaikan," ungkapny.

Maka Ledia pun mengingatkan bahwa pascavaksinasi setiap orang tetap harus menjalankan prokes 5M dengan ketat dan setiap Kementerian, Lembaga, organisasi termasuk sekolah harus pula mempersiapkan sarana prasana penunjang protokol kesehatan.

"Jadi sebelum menuju pembelajaran tatap muka terbatas, entah bisa dilakukan semester ini atau bahkan tahun depan, sekolah wajib sudah memiliki sarana prasarana prokes yang memadai. Antara lain cukup sarana sanitasi, seperti tempat-tempat cuci tangan, hand sanitizer, lalu ada tempat sampah khusus masker, menyiapkan alat belajar mengajar yang sudah bertanda khusus hingga menyiapkan S.O.P terkait PTM di masa pandemi, mekanisme pengawasan, evaluasi termasuk rujukan tracing jika kemudian ada yang terkonfirmasi positif covid," tegas aleg dari Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Hal-hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan dengan seksama karena menurut aleg dari Fraksi PKS ini, sekolah akan menjadi



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.I.T.**  
Anggota Komisi X DPR RI

"Prinsip utamanya adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat termasuk siswa, guru, tenaga kependidikan dan keluarga siswa harus menjadi prioritas nomor satu, sehingga tercapainya pemerataan vaksinasi harus bisa dipastikan serta penyiapan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan harus diperhatikan dengan sangat cermat, detil dan berkesinambungan dalam pengawasan serta evaluasinya"

tempat pertemuan rutin dari individu-individu yang unik secara kondisi kesehatan, kebiasaan dan perilaku. Hal ini tentu akan menjadi titik

perhatian tersendiri yang harus siap diantisipasi baik oleh orang tua maupun sekolah. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Anggota FPKS: Pemerintah Harus Lebih Serius Perhatikan dan Selesaikan Permasalahan Guru PPPK

## KUTIPAN

Jakarta (25/06) — Anggota Komisi X dari Fraksi PKS Sakinah Aljufri, mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan guru PPPK.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemanpan RB RI, Rabu, (23/06) secara virtual.

“Para guru honorer yang sudah mengabdikan lebih dari lima bahkan sepuluh tahun agar mendapatkan perhatian serius, terlebih mereka yang mengabdikan di daerah 3T. Medannya cukup menantang, harus melewati gunung dan sungai,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sakinah pun menyampaikan bahwa pengabdian guru yang telah mengabdikan lebih dari lima tahun harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah.

“Pengabdian mereka

selama lebih dari lima tahun bukan waktu yang sedikit. Apakah mereka harus diseleksi lagi, bersaing dengan pendatang baru. Mereka bukan pencari kerja, mereka sudah mengabdikan bertahun-tahun, sudah seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah,” tegasnya.

Para guru honorer menjerit di daerah, dengan gaung ASN PPPK yang luar biasa namun janji tinggal janji, bulan madu tinggal mimpi. Itulah yang mereka suarakan sampai saat ini. Dan tentunya pemerintah harus memperhatikan dengan serius, menanggapi semua suara tuntutan maysarakat.

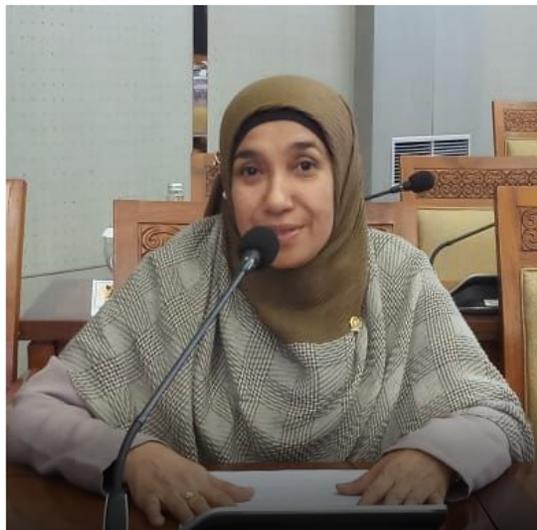
Sakinah pun menanyakan keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan proses penetapan NIP bagi ASN guru PPPK hasil seleksi tahun 2019.

“Sampai saat ini proses penetapan NIP guru PPPK Tahap 1 tahun 2019 belum selesai seratus persen, apa kendalanya sampai hingga belum selesai prosesnya?,” ungkap Sakinah.

Tentunya kita semua harus mengetahui apa kendalanya, karena ini selalu menjadi pertanyaan para guru kepada kami saat rese. Sakinah pun juga menanyakan perihal skema penggajian bagi guru yang sudah lolos seleksi namun belum terbit NIP dan SK bagi mereka.

“Kedua pertanyaan saya, apakah mereka yang sudah lulus seleksi namun sampai saat ini belum terbit NIP dan SK apakah akan mendapatkan rapel gaji,” tuturnya.

Kita minta Pemerintah pusat harus menanggapi apa yang menjadi keluh kesah anggota komisi X karena ini adalah suara dari dapil masing masing. Proses penetapan ini jika berlarut-larut lagi pasti akan muncul permasalahan-permasalahan yang mungkin dapat berakibat tidak bisanya penerbitan NIP.



**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag**

Anggota Komisi X DPR RI

“Pengabdian mereka selama lebih dari lima tahun bukan waktu yang sedikit. Apakah mereka harus diseleksi lagi, bersaing dengan pendatang baru. Mereka bukan pencari kerja, mereka sudah mengabdikan bertahun-tahun, sudah seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah,”

# Rapat Dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Aleg FPKS Tegaskan Utang Indonesia Mengkhawatirkan

## KUTIPAN

Jakarta (24/06) — Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Ketua Bappenas pada Rabu, 23 Juni 2021, di Jakarta.

Dalam rapat dengan topik Manajemen Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ini, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan sejumlah catatannya.

Catatan pertama yang disampaikan Anis tentang persoalan utama utang Indonesia. Menurut Anis, persoalan utama utang Indonesia adalah bagaimana agar penerimaan negara lebih dipacu dibanding utangnya.

"Sementara yang terjadi saat ini, utang tumbuh lebih tinggi, baik dibandingkan terhadap penerimaan negara maupun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga Indonesia semakin terjebak dalam hutang," ungkapnya.

Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

(BAKN) DPR RI ini melanjutkan pada catatan yang kedua terkait dengan porsi utang. Porsi utang dalam valas memang menurun menjadi 13% dari total utang pemerintah.

Akan tetapi menurut Anis, nilai rupiah yang cenderung terdepresiasi menyebabkan utang negara semakin riskan baik dalam hal cicilan pokok maupun bunganya.

"Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita masih mengatakan utang kita aman-aman saja," katanya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini kemudian menegaskan bahwa perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang benar-benar mencerminkan kondisi riil.

"Selama ini, perhitungan

yang dilakukan hanya utang pemerintah pusat terhadap PDB. Sedangkan utang BUMN tidak dimasukkan dalam hitungan. Praktek di negara-negara lain utang BUMN termasuk dalam kalkulasi rasio tersebut," ujar Anis.

Sejalan dengan itu, Anis menegaskan perlu klarifikasi apakah perhitungan rasio hutang pemerintah Indonesia terhadap PDB sudah apple to apple dengan perhitungan di negara lain?

"Tidak masuknya utang BUMN dalam hitungan, menyebabkan rasio utang Indonesia menjadi cukup rendah. Ini perlu klarifikasi," pintanya.

Catatan keempat disampaikan legislator PKS ini terkait data rasio utang terhadap ekspor yang telah mencapai 209%.

"Agar publik faham bahwa utang kita tidak baik-baik saja," tegasnya. Sebagaimana diketahui rasio utang ini semakin mengkhawatirkan karena ekspor Indonesia menghadapi tantangan penolakan dari negara-negara lain dengan



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

"Perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang benar-benar mencerminkan kondisi riil. Selama ini, perhitungan yang dilakukan hanya utang pemerintah pusat terhadap PDB. Sedangkan utang BUMN tidak dimasukkan dalam hitungan. Praktek di negara-negara lain utang BUMN termasuk dalam kalkulasi rasio tersebut"

alasan lingkungan. Ekspor yang di tolak di negara lain itu seperti CPO dan Batubara. "

Selain catatan diatas, Anis juga mengingatkan kekhawatiran BPK RI yang menyatakan meningkatnya utang pemerintah karena pandemi covid-19, sangat berbahaya. Dalam rapat

paripurna DPR RI pada Selasa (22/6/2021) BPK menyampaikan kekhawatirannya pemerintah tidak mampu membayar utang dan bunga utang, mengingat beberapa indikator yang cukup mengkhawatirkan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# DPR Usul Gaji di Bawah Rp 8 Juta Bebas Pajak!

## KUTIPAN

Jakarta (30/06) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan agar batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di Indonesia dinaikkan menjadi Rp 8 juta perbulan.

Ini dinilai akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi covid yang belum usai.

Hal ini menjadi usulan dari anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam dalam rapat Banggar penyampaian hasil panja RAPBN 2022 yang dilaksanakan pada Rabu (30/6/2021).

"Kami usulkan PTKP ditingkatkan menjadi Rp 8 juta sehingga wajib pajak yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah mendapatkan insentif berupa PTKP atau nggak harus bayar pajak," jelas Ecky.

Batas PTKP yang berlaku saat ini adalah Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. Perubahan PTKP terakhir kali pada tahun 2016 era Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Ecky menambahkan, kebijakan tersebut akan memberi-

kan efek bagi perekonomian Indonesia. Sebab, dengan tidak dikenakan pajak maka masyarakat berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah akan semakin meningkat belanja atau konsumsinya.

"PTKP naik Rp 8 juta maka multiplier efek ke rumah tangga yang meningkat dan akan menumbuhkan perekonomian kita," kata dia.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan bermotor roda dua berupa pembebasan bayar pajak. Ini diusulkan untuk kendaraan roda dua dengan kapasitas 150 cc ke bawah.

"Kami mohon dalam nota keuangan 2022 nanti sudah diberikan kelonggaran PTKP jadi Rp 8 juta dan pembebasan pajak kendaraan bermotor kendaraan roda dua," tegasnya.



## H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Kami usulkan PTKP ditingkatkan menjadi Rp 8 juta sehingga wajib pajak yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah mendapatkan insentif berupa PTKP atau nggak harus bayar pajak. kebijakan tersebut akan memberikan efek bagi perekonomian Indonesia. Sebab, dengan tidak dikenakan pajak maka masyarakat berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah akan semakin meningkat belanja atau konsumsinya. PTKP naik Rp 8 juta maka multiplier efek ke rumah tangga yang meningkat dan akan menumbuhkan perekonomian kita



DEWAN PE  
REPUB



*Selamat Jalan*

**DOKTER ADANG SUDRAJAT**

1962 - 2021

Anggota Fraksi PKS DPR RI Komisi IX  
Dapil Jawa Barat II

# BPK Temukan Kebocoran BLT untuk UMKM, Aleg PKS Sarankan Pemerintah Buat Data Terintegrasi

## KUTIPAN

Jakarta (26/06) — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) pada kementerian atau lembaga.

Salah satunya dalam program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, disebutkan terdapat kebocoran penyaluran BPUM sebesar Rp 1,18 triliun.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, disebutkan bahwa ada penerima BPUM yang tidak sesuai kriteria sebanyak 418.947.

Menanggapi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 ini, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan tanggapannya di Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Anis mengatakan sangat

prihatin dengan laporan yang disampaikan BPK terkait BLT untuk UMKM yang tidak tepat sasaran.

Menurut Anis, pemerintah pusat seharusnya mengandeng pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara serius dan berkala.

“Langkah ini harus secara konkret dilaksanakan mengingat urgensi dan situasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya untuk UMKM bangkit saat ini sangat bergantung pada ketersediaan data yang terintegrasi,” katanya.

Menurut ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini, program BLT untuk UMKM memang membuat pelaku

UMKM merasa terbantu, tapi belum cukup untuk membuat UMKM bangkit lagi.

“Bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah UMKM,” ujarnya.

“Selain memberikan BLT, Pemerintah juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun non fiskal,” tambah Anis.

Anis yang juga anggota Komisi XI DPR RI mengungkapkan bahwa saat ini UMKM memerlukan bantuan secara komprehensif.

“Misalnya mempermudah akses pasar melalui digital platform, memudahkan akses bahan baku UMKM, serta lainnya,” tegasnya.

Politisi senior PKS ini menyoroti Pemerintah untuk menjembatani komunikasi perusahaan besar dengan pelaku usaha kecil agar terjalin kemitraan.

“Misalnya, UMKM memangkas bahan baku ke perusahaan besar. Lalu perusahaan besar menjual produknya ke pasar lebih luas. Pola kemitraan seperti ini yang harus dikembangkan oleh Pemerintah,” tutupnya.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

“Program BLT untuk UMKM memang membuat pelaku UMKM merasa terbantu, tapi belum cukup untuk membuat UMKM bangkit lagi. Bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah UMKM,”

# Banggar DPR Sepakat Subsidi Listrik 450 VA Tak Dicabut

## KUTIPAN

Jakarta (01/07) --- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat tidak akan mencabut subsidi listrik berkapasitas 450 Volt Ampe-re (VA). Hal ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

"Kami memang sepakat, kami tidak mencabut subsidi terhadap 24,7 juta penerima subsidi (listrik berkapasitas 450 VA. Itu memang kami yang mendorong pemerintah," ungkap Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (30/6).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengatakan pengguna listrik 450 VA masuk dalam kategori masyarakat yang butuh bantuan pemerintah. Dengan demikian, subsidi dibutuhkan untuk meringankan beban mereka.

"Mereka orang-orang butuh bantuan dan tidak punya

keleluasaan secara finansial. Pengguna listrik 450 VA harusnya tetap dapat subsidi," jelas Ecky.

Dalam laporan panitia kerja (panja) asumsi dasar, kebijakan, fiskal, pendapatan, defisit dan pembiayaan dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 tertulis bahwa DPR menyarankan agar subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak.

Selain itu, diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Lalu, panja juga merekomendasikan transformasi subsidi listrik

rumah tangga terintegrasi dengan program bantuan sosial (bansos) dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi geografis. DPR juga mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan indikos atau kos-kosan dengan kapasitas listrik berdaya 450 VA terancam dicabut pemberian subsidi listrik karena tidak tepat sasaran.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan menyinkronkan data penerima subsidi listrik dari data PLN maupun DTKS di Kementerian Sosial.

"Misal kos-kosan, biar dapat subsidi dia pasang 450 VA, ini yang kami mau keluarkan (dari daftar penerima subsidi listrik), karena lagi-lagi semangatnya adalah subsidi ini disalurkan lebih tepat sasaran. Kalau ke kos-kosan, tidak tepat sasaran," ungkap Rida dalam konferensi pers virtual pada awal Juni 2021 lalu.

Sementara, Kementerian ESDM masih mengkaji pihak



## H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Badan Anggaran DPR RI

"Pengguna listrik 450 VA masuk dalam kategori masyarakat yang butuh bantuan pemerintah. Dengan demikian, subsidi dibutuhkan untuk meringankan beban mereka. Mereka orang-orang butuh bantuan dan tidak punya keleluasaan secara finansial. Pengguna listrik 450 VA harusnya tetap dapat subsidi"

mana saja yang akan tetap mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah. Namun, Rida memastikan nantinya seluruh

data penerima subsidi merupakan mereka yang namanya ada di data DTKS.



**PERSEMBAHAN**  
**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

# LOMBA BACA TEKS PROKLAMASI MIRIP SUARA **SOEKARNO** 2021



**INDONESIA**  
**TANGGUH**  
**INDONESIA**  
**TUMBUH**



## TAHAPAN



**8 Juli 2021**  
 Launching  
 Lomba



**3 Agustus 2021**  
 Batas pengumpulan  
 video di tingkat  
 Fraksi PKS DPRD



**17 Agustus 2021**  
 Pengumuman  
 Finalis  
 10 Besar



**19 Agustus 2021**  
 Grand  
 Final

TOTAL HADIAH  
**Rp. 17 Juta**

Juara 1	Rp 6.000.000
Juara 2	Rp 4.500.000
Juara 3	Rp 3.000.000
Juara Harapan 1	Rp 2.000.000
Juara Harapan 2	Rp 1.500.000



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
 Ketua Fraksi PKS DPR RI



**Dr. H. SALIM SEGAF ALJUFRI, MA**  
 Ketua Majelis Syuro PKS

# Legislator PKS Serahkan Benih Kakao Seluas 100 Hektar di Kabupaten Bone

## KUTIPAN

Kabupaten Bone (23/06) -- Legislator asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyerahkan bantuan benih Kakao di Kabupaten Bone.

Benih kakao, kata Akmal, untuk dapat ditanam di area seluas 100 Hektar ini diserahkan bersamaan dengan Bimbingan teknis untuk petani.

"Benih kakao ini merupakan aspirasi atau permintaan petani kepada pemerintah. Kami di DPR menyuarakan kepada pemerintah agar ada upaya mengembalikan kejayaan Kakao di Indonesia. Kalau sentra Sawit ada di Sumatra dan Kalimantan, maka untuk kakao ini sentranya ada di Sulawesi Selatan", urai Akmal.

Penyerahan Kakao yang dilakukan anggota DPR RI ini di lakukan di Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone di hadir langsung oleh Andi Akmal yang kerap di sapa masyarakat dengan AAP.

Akmal yang didampingi oleh team penggerak lapangan sekaligus penghubung masyarakat dengannya

menjadikan pertemuan dengan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pekebun sebagai ajang penyerahan aspirasi dimana akan dijadikan bahan ajuan sidang di Komisi IV DPR RI.

Akmal menerangkan, pihaknya telah memperjuangkan bangkitnya kakao ini sudah sejak beberapa tahun silam.

Tahun lalu, Akmal rutin memberikan semangat dan motivasi sejumlah petani sekaligus diberikannya stimulus bibit kakao kepada para petani. Baru-baru ini, di hadapan Menteri dan seluruh jajaran eselon 1 kementerian pertanian, Akmal juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan fokus kebijakan dan tindakan untuk kemajuan kakao Indonesia yang di mulai di Sulawesi Selatan.

"Alhamdulillah, tahun 2021 ini, bantuan pemerintah

dalam bentuk bibit tanaman kakao sudah semakin masif. Sekarang bagaimana mempertahankan semangat petani dengan pendidikan, pendampingan dan pengawalan sarana dan prasarana produksinya hingga kakao ini berhasil kembali bangkit di Indonesia yang berpusat di Sulsel", urai Akmal.

Politisi PKS ini meyakinkan kepada masyarakat, bahwa setiap detail penanaman kakao ini mesti serius mulai dari penyiapan lahan yang baik. Kemudian menanam dengan bibit yang terbaik. Perawatan, panen, pasca panen juga diminta untuk dikelola secara profesional termasuk dengan pengembangan pasar hingga ke perdagangan internasional.

"Kita semua mesti berupaya maksimal untuk sesuatu hal. Bapak ibu petani kakao yang serius dalam memproduksi kakao, insyaAllah, kita semua akan mendukung, baik di lingkungan DPR maupun pemerintah. Semoga Kakao menjadi komoditas terbaik di Indonesia, hingga dunia mengukainya", tutup Andi Akmal Pasluddin dalam sambutannya.



**Dr. H. ANDI AKMAL  
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

“Dengan terbentuknya holding perusahaan gula milik negara, kita semua rakyat Indonesia menaro harapan besar akan ada perubahan dalam pemenuhan gula di masyarakat dengan harga wajar dan produk yang berkualitas.”



# Aleg PKS Prihatin Kasus Covid Anak Meningkatkan Tajam di Jakarta

## KUTIPAN

Jakarta (26/06) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengaku prihatin dengan kasus Covid-19 anak-anak meningkat tajam di DKI Jakarta.

Mufida pun mengimbau agar para orang tua lebih fokus dan perhatian dalam menjaga anak-anaknya agar selalu memperhatikan protokol Kesehatan serta menjaga asupan nutrisi bagi anak-anaknya.

"Secara pribadi saya prihatin dengan meningkat tajam kasus Covid-19 yang diderita anak-anak. Kasus Covid anak-anak meningkat tajam dan ini menjadi keprihatinan kita semua. Apalagi anak berisiko tinggi terpapar," kata Mufida, Jum'at (25/06/2021).

Data dari situs corona.jakarta.go.id, per 23 Juni, akumulasi kasus anak sudah mencapai 59.741 kasus. Rinciannya, 46.330 kasus pada anak usia 5-18 tahun, 10.726 kasus pada anak usia 1 - 4 tahun, dan 2.685 kasus pada anak usia di bawah 1 tahun.

Dengan kasus Covid yang semakin melonjak tajam ini

Mufida mengajak para orang tua bisa membatasi anggota keluarganya untuk tidak banyak beraktivitas di ruang publik yang terbuka seperti mall, pasar dan area wisata. Sebab, bila bepergian dengan keluarga bermasker, namun anak-anak sangat rentan ketika bergerak dan pastinya tidak ketat dalam menerapkan protokol Kesehatan termasuk saat bermasker. Anak-anak juga banyak bergerak dalam aktivitasnya.

"Virus sangat cepat penularannya. Apalagi varian baru Covid-19 Delta saat ini menimbulkan kekhawatiran ekstra karena berpotensi menyerang anak-anak. Data pun menunjukkan varian Delta menyerang pasien dengan rentang usia dibawah 18 tahun pada sejumlah daerah yang mengalami lonjakan kasus Covid, termasuk di Jakarta,"

terang Anggota DPR RI Dapil Jakarta II yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri.

Untuk kasus Covid-19 di Jakarta, jelasnya, pada Kamis telah memecahkan rekor kasus harian dengan 7.505 kasus. Dan yang diluar dugaan adalah sebanyak 15 persen kasus Covid atau 1.112 kasus Covid diantaranya adalah diderita anak-anak.

"Dari hari ke hari saat ini meningkat kasus Covid anak. Kamis kemarin ada 830 kasus anak usia 6-18 tahun dan 282 kasus adalah anak usia 0-5 tahun. Diduga anak-anak yang terkena Covid-19 berasal dari cluster keluarga dan tertular dari orang tuanya," ujar Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS ini.

Mufida pun berharap agar orang tua lebih waspada dan lebih menjaga anak-anaknya seiring meningkatnya jumlah kematian anak akibat virus corona. Dimana kasus Covid-19 anak di Indonesia mencapai tingkat kasus tertinggi di dunia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Virus sangat cepat penularannya. Apalagi varian baru Covid-19 Delta saat ini menimbulkan kekhawatiran ekstra karena berpotensi menyerang anak-anak. Data pun menunjukkan varian Delta menyerang pasien dengan rentang usia dibawah 18 tahun pada sejumlah daerah yang mengalami lonjakan kasus Covid, termasuk di Jakarta"



*Mari Tetap*  
**Patuhi** Protokol  
*Kesehatan*

# Kunjungi Dapil, Johan Rosihan Adakan Kegiatan Sunatan Massal

## KUTIPAN

Sumbawa (25/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengadakan kegiatan sunatan massal saat mengunjungi Dapilnya, di Desa Tatebal, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, Kamis (24/06/2021).

"Sebanyak 1.000 anak telah ditargetkan dalam kegiatan sunatan massal yang digagas oleh Johan Rosihan Peduli sepanjang tahun 2021. Semoga terus bisa berkesinambungan dan memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat," ungkap Johan.

Program sunatan massal sengaja digagas oleh teman-teman yang tergabung dalam JR Peduli untuk meringankan beban masyarakat di banyak Desa terpencil di Sumbawa. Mereka berharap bisa bersilaturahmi dengan cara lain.

Camat Lenangguar, Syahrudin yang juga berkesempatan hadir dalam

kegiatan tersebut mengapresiasi program sunatan massal karena dinilai positif sehingga sangat membantu masyarakat yang tidak mampu.

"Ini pertama kali desa kami dikunjungi oleh Anggota DPR RI dan langsung melaksanakan program. Ini tentu merupakan suatu kebanggaan. Terimakasih kepada pak Johan yang telah memberikan perhatian khusus." Ungkapnya.

Tak hanya sunatan massal, politisi asal Sumbawa itu juga membagikan bantuan Al-Quran kepada para pengurus masjid di Desa setempat. Johan berharap, program ini bisa

dimaknai sebagai bentuk silaturahmi antara dirinya dengan masyarakat.

Ia mengungkap bahwa kedatangannya memang benar memuat unsur politik, tapi politik yang dimaksud bukanlah politik yang bebas nilai, tetapi politik yang memperjuangkan nilai-nilai baik.

"Saya minta doa dari bapak/ibu sekalian agar tetap sehat, supaya bisa kembali ke tempat ini lagi pada kesempatan lain." Tutup sosok yang akrab disapa JR tersebut.



## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I

"Sebanyak 1.000 anak telah ditargetkan dalam kegiatan sunatan massal yang digagas oleh Johan Rosihan Peduli sepanjang tahun 2021. Semoga terus bisa berkesinambungan dan memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat"



# Kunjungi Dapil, Aleg PKS Perjuangkan Perbaikan Jembatan Rusak di Desa Margasari

## KUTIPAN

Dari kunjungan ini, Ketua BPD Desa Margasari mewakili warga mengajukan beberapa aspirasi terkait pembangunan desanya kepada Toriq untuk diperhatikan oleh Pemerintah. Salah satu aspirasi warga desa adalah membangun kembali jembatan desa mereka.

Tasikmalaya (28/06) — Disela masa sidang, Anggota Legislatif DPR RI Toriq Hidayat berkunjung ke desa-desa di daerah pemilihannya yang meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut.

Kali ini atas undangan dari salah seorang Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Toriq mengunjungi Desa Margasari.

Politisi PKS ini diminta oleh Ketua BPD Desa Margasari Kecamatan Ciawi untuk meninjau kondisi jembatan yang roboh akibat dihantam banjir beberapa waktu yang

lalu.

“Saat ini warga desa menggunakan jembatan darurat yang buat oleh mereka sendiri. Kondisinya sudah tidak layak”, sebut Toriq.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BPD desa Margasari, Toriq menyebutkan bahwa hujan deras yang menguyur selama 3 jam di beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya November lalu menyebabkan banjir merendam ratusan rumah di beberapa desa salah satunya Desa Margasari.

“Sungai yang melintasi perkampungan tidak mampu

menampung derasnya air hujan sehingga masuk ke pemukiman warga. Banjir ini juga merusak beberapa akses jalan yang dilalui oleh warga desa, salah satunya jembatan ini,” ungkap Toriq.

Dari kunjungan ini, Ketua BPD Desa Margasari mewakili warga mengajukan beberapa aspirasi terkait pembangunan desanya kepada Toriq untuk diperhatikan oleh Pemerintah. Salah satu aspirasi warga desa adalah membangun kembali jembatan desa mereka.

“Saya dan teman-teman PKS di Komisi V akan menyampaikan aspirasi dari warga desa Margasari ini kepada Pemerintah. Kami akan memperjuangkan aspirasi mereka masuk kedalam rencana dan realisasi kerja Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur”, kata Toriq.



## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

“Hujan deras yang menguyur selama 3 jam di beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya November lalu menyebabkan banjir merendam ratusan rumah di beberapa desa salah satunya Desa Margasari. Sungai yang melintasi perkampungan tidak mampu menampung derasnya air hujan sehingga masuk ke pemukiman warga. Banjir ini juga merusak beberapa akses jalan yang dilalui oleh warga desa, salah satunya jembatan ini,”

# Aleg PKS Beri Bantuan Warga Terdampak Covid-19 di Dapil

## KUTIPAN

Tasikmalaya (25/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Toriq Hidayat bersama jajaran pengurus DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya mengunjungi posko Isolasi Mandiri Kampung Kertasari Desa Sariwangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya pada hari Kamis (24/06/2021).

Kehadiran Politisi PKS asal Dapil Jabar 11 bersama dengan pengurus DPD PKS ini dalam rangka memberikan bantuan berupa paket bahan pokok kepada warga terdampak Covid yang berada di Posko Isolasi Mandiri yang berlokasi di SMPN Sariwangi.

Bantuan paket bahan pokok yang diberikan oleh PKS ini diterima secara simbolis oleh Ketua Posko Isolasi mandiri Kampung Kertasari Desa Sariwangi. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Tim Satgas Covid-19 Kecamatan Sariwangi (Kepala Puskesmas dan dokter), Kepala Desa Sariwangi dan Koramil Kec.Sariwangi.

Toriq Hidayat

menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian PKS kepada warga yang terdampak Covid-19.

“Kunjungan PKS ini adalah bentuk kepedulian kami, sekaligus mendistribusikan paket bahan pokok kepada warga yang terdampak langsung. Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa meringankan beban saudara kita,” katanya.

Mengamini apa yang disampaikan oleh Aleg Pusat PKS, Ketua DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya Ruli Irawan menambahkan bahwa bantuan bahan pokok kepada warga ini merupakan realisasi dari Rapat Kerja Daerah

(Rakerda) DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan pada akhir Mei lalu. Salah satu pointnya yaitu berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Saat ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan di kota/kabupaten di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan khususnya Kecamatan Sariwangi total kasus Covid-19 sudah mencapai 525 kasus terkonfirmasi positif (16/06/2021). Dan di Kecamatan Sariwangi ini kasus Covid-19 yang pertama kali muncul April 2020 lalu.

Warga yang terpapar Covid-19 tersebut bahkan mulai meluas. Dari awalnya berada di dua kampung, kini menyebar ke tiga kampung, yakni Bojongpetir, Kertasari, dan Pacet di Desa/Kecamatan Sariwangi. Saat ini warga yang berada di Posko Isolasi Mandiri Desa Kertasari berjumlah 62 orang dan dalam pengawasan Tim Satgas Covid-19 .



## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

“Kunjungan PKS ini adalah bentuk kepedulian kami, sekaligus mendistribusikan paket bahan pokok kepada warga yang terdampak langsung. Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa meringankan beban saudara kita”

### Profil

- Nama Lengkap  
**H. Suryadi Jaya Purnama, S.T**
- Tempat, Tanggal Lahir  
**Lenek, 25 Februari 1974**
- Dapil  
**Nusa Tenggara Barat II**  
(Pulau Lombok)

### Pendidikan

- SMAN 1 Mataram  
Lombok
- S1 Teknik Sipil  
Universitas Mataram

### Riwayat Pekerjaan

- **Direktur CV. JP Agro**
- **Komisaris PT. Rinjani Gumi Paer**
- **Komisaris CV. Tambora Gumi Paer**
- **Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB**
- **Anggota DPR-RI, 2019-2024**

### Keluarga

- Istri : **Nuryanti Tadjuddin, SE, ME.**
- Anak : **4 Laki-Laki**  
**: 1 Perempuan**

### Riwayat Organisasi

- **Ketua KAMMI Daerah NTB**
- **Majelis Adat Sasak Paer Timuk**
- **Ketua Umum PTMSI NTB**
- **Ketua DPW PKS NTB**
- **Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Mataram**

### Media Sosial

- **f : Suryadi Jaya Purnama**
- **t : Suryadi Jaya Purnama**
- **@suryadi.sjp**
- **▶ : SJP Channel A.452**

Hadir Pelantikan Alpind 50 Kota

# Nevi Sampaikan Pentingnya Kaum Perempuan dalam Pembangunan Nasional

## KUTIPAN

Kabupaten Limapuluh Kota (24/06) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina hadir pada pelantikan pengurus Alpind (Aliansi Perempuan Indonesia)

yang merupakan sebuah Organisasi Kemasyarakatan yang terurus ekis di Sumatera Barat khususnya, dan di beberapa daerah di seluruh Indonesia.

Nevi yang juga sebagai ketua Alpind tingkat provinsi Sumatera Barat mengingatkan kepada seluruh pengurus daerah agar memegang teguh fokus utama perjuangan Alpind yakni penguatan Keluarga dalam Pembangunan Nasional.

"Visi Alpind adalah Perекat Persaudaraan dan kontribusi dalam membangun Indonesia yang bermartabat berbasis nilai Agama dan Budaya. Untuk itu, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka Alpind Sumatera Barat mesti dapat mewadahi para perempuan dalam ikut serta berpartisipasi mengatasi berbagai persoalan bangsa.

Para perempuan di seluruh Indonesia khususnya Sumatera Barat termasuk di Kabupaten 50 Kota ini mesti dapat ambil bagian secara proaktif dalam mengidentifikasi, menganalisa serta mencari solusi setiap permasalahan dan menjadi sarana dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga, kebangsaan dan politik", urai Nevi.

Legislator PKS ini juga menambahkan, akan pentingnya membangun kemitraan serta kerjasama dengan berbagai pihak dan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada pada masyarakat. Menjadi bagian dari solusi permasalahan bangsa dengan bingkai agama dan budaya.

"Core dari Alpind adalah Pengarusutamaan keluarga.

Harus kita akui bahwa pengarusutamaan keluarga secara nasional masih dilakukan secara sektoral. Maka, oleh sebab itu Alpind tidak bisa sendiri, harus berkoordinasi dengan organisasi lain. Untuk Tingkat kebijakan Nasional, Alpind akan berkontribusi dengan mendorong lahirnya Undang-Undang yang benar-benar melindungi keluarga secara komprehensif", pesan Nevi.

Politisi Perempuan Sumbar ini meminta kepada seluruh pengurus Alpind, dengan dilantiknya 19 Pengurus Daerah kota/kabupaten se-Sumatra Barat yang insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan secara maraton termasuk yang saat ini dilakukan di kabupaten 50 kota, agar mengantarkan sumbangsih Alpind masuk hingga ke pelosok Indonesia khususnya Sumatra Barat.

"Semoga dengan kondisi pandemi yang belum tahu entah kapan berakhirnya, tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berkontribusi. Dengan tetap menjaga protokol covid jaga jarak, cuci tangan



## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

“Core dari Alpind adalah Pengarusutamaan keluarga. Harus kita akui bahwa pengarusutamaan keluarga secara nasional masih dilakukan secara sektoral. Maka, oleh sebab itu Alpind tidak bisa sendiri, harus berkoordinasi dengan organisasi lain”

dan pakai masker. Insya Allah dengan izin Allah semoga kita diberi kemudahan untuk melaksanakan visi misi Alpind

yang tertuang dalam program program kerja masing masing bidang”, tutup Nevi Zuairina dalam sambutannya.

# Kunjungi Dapil, Hermanto **Hadiri** Khitanan Massal

## KUTIPAN

Kabupaten Solok (28/06) --- Anggota DPR Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan ke dapil menghadiri kegiatan khitanan massal yang diselenggarakan oleh Bidang Kesejahteraan Sosial DPD PKS Kab. Solok.

Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat yang berasal dari Kecamatan Kubung, Bukit Sundi dan Gunung Talang.

"Kegiatan ini merupakan program pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi visi misi PKS rahmatan lil a'lamain, memberikan rahmat bagi seluruh alam," ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

"Kegiatan ini juga merupakan pengamalan sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tambah legislator dari FPKS DPR ini.

Dalam kesempatan tersebut, Hermanto menyampaikan bahwa khitan dalam ajaran Islam merupakan wajib bagi setiap laki-laki muslim.

"Karena itu, kegiatan

khitan massal yang dilaksanakan oleh DPD PKS Kabupaten Solok merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang mulia didasarkan pada prinsip saling bantu dalam sosial kemasyarakatan," jelas Hermanto.

Kegiatan khitan tersebut terselenggara dengan dukungan Anggota FPKS DPR RI dari Dapil Sumbar 1, Anggota FPKS DPRD Propinsi Sumbar Dapil Solok Raya dan para Anggota FPKS DPRD Kabupaten Solok.

Dalam kegiatan ini Hermanto didampingi Ketua DPD PKS Kabupaten Solok Nazar Bakri, Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial merangkap ketua panitia Elfitri Syafri dan tokoh muda setempat Roi Yurnades.



## Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Khitan dalam ajaran Islam merupakan wajib bagi setiap laki-laki muslim. Karena itu, kegiatan khitan massal yang dilaksanakan oleh DPD PKS Kabupaten Solok merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang mulia didasarkan pada prinsip saling bantu dalam sosial kemasyarakatan"

# Covid-19 di Jakarta Meningkat Lagi HNW Kembali **Bagikan** Bantuan Sosial dan Tabung Oksigen bagi Warga

## KUTIPAN

Jakarta (27/06) — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, kembali membagikan paket bantuan isolasi mandiri beserta tabung oksigen kepada ratusan warga Jakarta yang terpapar covid-19.

Hidayat memahami bahwa kapasitas pelayanan kesehatan saat ini sudah makin terbatas mengingat lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, sehingga sebagian besar warga yang terpapar covid-19 harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri ini berharap paket bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi dan sanitasi warga yang menjalani isolasi mandiri agar bisa kembali sehat dan beraktivitas seperti sediakala.

"Banyak warga kesulitan isolasi mandiri karena terbatasnya sumber daya, padahal

RS juga sudah banyak yang tidak bisa menampung. Untuk itu saya berupaya membantu dengan mendistribusikan paket isoman agar warga bisa menjalani penyembuhan dengan maksimal sekalipun di rumah masing-masing," disampaikan Hidayat pasca menyerahkan simbolis bantuan kepada warga Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (27/06).

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menjelaskan, penambahan kasus Covid-19 di Indonesia pada Sabtu (26/06/2021) kembali memecahkan rekor mencapai 21.095 orang, di mana 9.271 diantaranya terdapat di Jakarta.

Sementara itu tingkat keterisian tempat tidur atau

BOR di Jakarta hingga 23 Juni 2021 telah mencapai 83%. Hal ini menyebabkan semakin banyak warga Jakarta terpapar covid-19 hingga gejala sedang yang harus menjalani perawatan di rumah dan isolasi mandiri.

"Berdasarkan panduan isolasi mandiri yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, warga positif Covid-19 yang menjalani isoman harus menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih, konsumsi makanan bergizi, sering mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan," terang HNW.

HNW juga berpesan kepada warga untuk ikut vaksinasi, mentaati arahan pemerintah atau dokter agar bisa kembali sembuh sehat dan selamat dari korona, mempraktekkan 5M Prokes terkait covid-19.

"Juga dengan praktekkan 'M' yang sangat penting bagi Umat beragama, yaitu Memperbanyak doa/munajat/baca alQuran. Agar nanti sehat dan selamatnya juga sehat dan selamat lahir dan batin," ujarnya.



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Banyak warga kesulitan isolasi mandiri karena terbatasnya sumber daya, padahal RS juga sudah banyak yang tidak bisa menampung. Untuk itu saya berupaya membantu dengan mendistribusikan paket isoman agar warga bisa menjalani penyembuhan dengan maksimal sekalipun di rumah masing-masing"

Oleh karena itu pria yang akrab disapa HNW ini memberikan bantuan paket kepada warga terdampak covid-19 yang berisi sembako, vitamin, masker, sabun tangan dan sabun cuci piring, handsanitizer,

tiyu, hingga tabung oksigen untuk warga isoman yang mengalami penurunan saturasi oksigen.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Kasus Covid-19 Terus Meningkat

## Aleg PKS Kembali Serahkan Bantuan

KUTIPAN

Purbalingga (02/07) --- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rofik Hananto kembali menyerahkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid-19, Jumat (2/7).

Bantuan tersebut didistribusikan ke masyarakat di Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Banyumas, Cilacap, dan Wonosobo.

Bantuan yang diserahkan berupa 1000 paket makanan siap saji, 1000 lauk pauk, 1000 hand sanitiser kemasan 500 ml, 3000 handsantizer botol, 1000 box kurma, dan 7 tabung oksigen. Bantuan secara simbolis diterima pimpinan DPD PKS masing-masing kabupaten.

Rofik mengatakan, bantuan untuk masyarakat terdampak covid ini diberikan karena kondisi masyarakat Banyumas Raya termasuk Purbalingga yang terpapar cukup naik seperti terjadi gelombang kedua pandemi.

"Kami memberikan bantuan yang sangat diperlukan masyarakat, khususnya tabung oksigen. Karena di mana-mana

sulit untuk mendapatkannya. Kami mencari kesana kemari juga hanya dapat 7 tabung. Dibagi 6 kabupaten, salah satunya Purbalingga," katanya.

Dia menegaskan, tabung oksigen tersebut diperuntukkan bagi masyarakat. "Silakan hubungi kantor DPD PKS masing-masing kabupaten," kata legislator asal dapil Jawa Tengah VII itu.

Pemberian bantuan tabung oksigen dilatarbelakangi adanya beberapa kejadian yang dilaporkan. Pasien covid menunggu ambulans sampai berjam-jam. Sebagian terlambat penanganan karena saturasi yang terus menurun. Rumah sakit juga kekurangan tabung oksigen.

"Kami akan terus menyiapkan tabung oksigen dan mencari. Mudah-mudahan bisa diserahkan ke berbagai

lembaga atau komunitas masyarakat, termasuk pemerintah desa untuk dimanfaatkan bagi masyarakat," kata anggota Komisi VII DPR RI itu.

Rofik menambahkan, pihaknya juga menyediakan makanan siap konsumsi memanfaatkan momen Jumat Berkah. Juga ada ada lauk, kurma dan berbagai makanan, nutrisi, handsantiser.

"Ini bagian dari sedikit empati kami kepada masyarakat yang terdampak covid. Kami doakan semoga mereka yang terpapar covid cepat sembuh. tidak ada lagi yang wafat. Dan yang tidak terkena covid semoga tetap sehat," katanya.

Rofik menambahkan, pihaknya juga mendapatkan bantuan CSR dari PT HEW untuk disalurkan kepada masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan bantuan untuk mengatasi dampak covid maka bantuan diarahkan untuk itu.

"Masyarakat harus menaati prokes. 5M dan 7M. Minimal mencuci tangan dengan sabun memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kurangi mobilitas. Tetap di rumah. Kurangi kumpul-kumpul sampai covid mereda. Kita sama-sama menjaga untuk kebaikan bersama," ujarnya.

Sementara Ketua BPD PKS Jawa Tengah 8 Ustadz Saefullah mengatakan, atas nama para kader di 6 kabupaten



**H. ROFIK HANANTO, S.E**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Ini bagian dari sedikit empati kami kepada masyarakat yang terdampak covid. Kami doakan semoga mereka yang terpapar covid cepat sembuh. tidak ada lagi yang wafat. Dan yang tidak terkena covid semoga tetap sehat,"

mengucapkan jazakumullah kepada Rofik Hananto.

"Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelapangan rezeki. Semoga menjadi pemi-

cu kami untuk tetap berkhidmat bersama PKS dan menjadikan masyarakat juga tidak melupakan kerja dan kinerja kader-kader PKS," katanya.



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Salurkan*  
**ASPIRASI ANDA**  
**DI HARI ASPIRASI**  
**FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan  
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

# Legislator PKS Terima Aspirasi DPR Papua Terkait Revisi UU Otsus Papua

## KUTIPAN

Jakarta (23/06) — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Junaidi Auly menerima aspirasi dan masukan dari Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terkait revisi Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Junaidi Auly, selaku Koordinator Fraksi PKS dalam Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Otsus Papua ini mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRP menjadi landasan untuk kami membahas dan memperjuangkan demi kesejahteraan masyarakat Papua.

"Aspirasi ini menjadi masukan yang lebih komplit dari aspirasi sebelumnya yang telah disampaikan kepada kami di Fraksi PKS," ujar Junaidi saat terima aspirasi dari Wakil Ketua dan Anggota DPRP di Senayan, Jakarta, Rabu, (23/06)

Doktor Ilmu Pemerintahan

IPDN ini melanjutkan, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan yaitu dana otsus Papua harus memprioritaskan alokasi anggarannya untuk pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM, kesehatan, dan kesejahteraan. Beberapa isu ini harus kita perjuangkan alokasinya demi kemajuan dalam pendidikan dan jaminan kesehatan dan kesejahteraan untuk masyarakat Papua.

Selain itu, Legislator asal Lampung ini juga mengingatkan bahwa dana otsus Papua harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.

Penyerapannya harus jelas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.

"Dengan tambahan anggaran menjadi 2,25 persen diharapkan dana otsus ini bisa menjangkau semua aspek kehidupan masyarakat Papua," pungkas Junaidi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRP Bapak Yunus Wonda mengatakan harapannya kepada Fraksi PKS DPR RI untuk bisa memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Papua ini dalam rapat Pansus sehingga bisa memberikan solusi atas permasalahan Papua saat ini.

"20 tahun pelaksanaan Otsus Papua tidak banyak berarti untuk masyarakat Papua, karenanya kami berharap Fraksi PKS bisa memperjuangkan aspirasi ini karena di DPR lah harapan terakhir kami dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Papua," tutup Yunus Wonda.



**Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Komisi XI DPR RI/ Koordinator Fraksi PKS dalam Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Dana Otsus Papua

"Ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan yaitu dana otsus Papua harus memprioritaskan alokasi anggarannya untuk pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM, kesehatan, dan kesejahteraan. Beberapa isu ini harus kita perjuangkan alokasinya demi kemajuan dalam pendidikan dan jaminan kesehatan dan kesejahteraan untuk masyarakat Papua.





*Turut  
Berduka  
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut Berduka Atas wafatnya

## **Hj. Rachmawati Soekarnoputri, MH.**

(Putri Presiden Pertama RI Ir. Soekarno)

Wafat Pada Sabtu 3 Juli 2021  
di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat

Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya  
serta menempatkannya di tempat  
terbaik Jannah-Nya Amin



**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

# Dukung HRS Tolak Vonis dan Banding HNW: **Harusnya Vonis Berkeadilan, Bukan Diskriminasi Hukum**

## KUTIPAN

Jakarta (25/06) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengkritisi vonis empat tahun terhadap Habib Rizieq Shihab

dalam kasus tes swab di RS UMMI sebagai vonis yang tidak memenuhi rasa keadilan umum dan harapan tegaknya hukum dan harapan tegaknya hukum berkeadilan, ketentuan yang sangat dipentingkan dalam Pancasila sehingga disebutkan 'adil' dalam sila ke 2 dan ke 5.

Terpenuhinya rasa keadilan itu, kata Hidayat, juga menjadi ciri daripada Negara hukum yg sudah dipaterikan dalam UUDNRI 1945 ps1 1 ayat 3, yang salahsatu cirinya adalah kesetaraan di depan hukum (equality before the law) sebagaimana juga ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945.

"Maka wajar sekali apabila Habib Rizieq Shihab menolok dan menyatakan banding atas vonis hakim itu, karena khalaq-yak awam hukum pun sudah bisa menilai sendiri adanya keti-

dakadilan dalam vonis tersebut dan ketidaksesuaiannya dengan fakta di lapangan soal 'kebohongan' dan fakta tidak terjadinya keonaran akibat pernyataan HRS" ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jum'at(25/06).

HNW sapaan akrabnya mengatakan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) bahwa Habib Rizieq terbukti berbohong atas tes swab antigen yang dilakukannya sehingga menimbulkan keonaran.

"Saksi ahli dibawah sumpah menyatakan bahwa pernyataan HRS bukan kebohongan. Dan berbeda dengan vonis Hakim, ternyata tidak pernah terbukti bahwa setelah dipublikasikannya pernyataan HRS kemudian terjadinya keonaran di masya-

rahat. Terjadinya 'keonaran' di masyarakat justru akibat pernyataan dakwaan/tuduhan Jaksa kepada HRS yg mempersoalkan 'imam besar' nya HRS," ujarnya.

Sekalipun vonis hakim itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang memang terlalu tinggi dan tidak berdasarkan keadilan hukum, HNW menilai, bahwa dengan logika vonis hakim soal kebohongan publik terkait covid-19 yang katanya menimbulkan keonaran.

"Maka setelah preseden vonis terhadap HRS itu, pengadilan di Indonesia demi menegakkan prinsip negara hukum berkeadilan, mestinya juga memberikan sanksi hukum kepada beberapa menteri yang diawal masa pandemi covid-19 malah secara demonstratif menyampaikan ke publik informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau fakta. Ada yang sebut covid-19 tak akan masuk ke Indonesia karena birokrasi dan iklim tropisnya, ada yang sebut virus covid-19 akan mati sendiri karenanya tak perlu masker karena masyarakat hanya untuk yang sakit,



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

"Sudah sangat wajar dan benar apabila upaya banding yang ditempuh. Ini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat baik aparat maupun rakyat bahwa Habib Rizieq selalu mentaati prosedur hukum yang berlaku di Indonesia,"

ada yang bilang tidak akan kena covid karena biasa makan nasi kucing. Ada yang promosikan kalung anti covid-19 dan lainnya," urai HNW.

Pernyataan publik beberapa Menteri itu,

imbuhnya, tidak sesuai fakta tapi karena menyepelkan soal covid-19 sehingga penanganan atasi covid-19 tidak serius dan terprogram sejak awal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Hari Bidan Nasional, Aleg FPKS: Sejahterakan Bidan, Selamatkan Ibu Indonesia

## KUTIPAN

Jakarta (24/06) — Anggota DPR yang juga ketua Dewan Syariah Pusat PKS dari Daerah Pemilihan Jabar 11, Surahman Hidayat

dalam rangka memperingati Hari Bidan Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Juni mengingatkan bahwa, Indonesia masih menduduki posisi ketiga Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi di ASEAN tahun 2017 dengan 177 kematian per 100 ribu kelahiran.

Surahman menambahkan, hanya sedikit lebih baik daripada Laos (185 kematian per 100 ribu kelahiran) dan Myanmar (250 kematian per 100 ribu kelahiran).

"Bukti empiris menunjukkan bahwa AKI tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil, pemeriksaan saat masa kehamilan, pertolongan persalinan dan perawatan segera setelah persalinan," ungkap Surahman.

Lebih lanjut Surahman

menjelaskan Bidan sangat berperan dalam meningkatkan keselamatan Ibu dan bayi baru lahir dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan dan anak yang baru lahir.

Menurut Anggota Komisi 8 DPR RI ini Secara nasional, sebagian besar puskesmas memiliki bidan lebih dari standar minimal.

"Namun, bila dilihat dari distribusi pada tingkat desa/kelurahan, masih terdapat kekurangan. Untuk itu diperlukan kebijakan Satu Desa, Satu Polindes, Satu Bidan terlatih".

Pondok Bersalin Desa (Polindes), imbuah Surahman, adalah partisipasi atau peran serta masyarakat suatu desa dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan bayi di desa.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pembangunan Desa perlu berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mengatur alokasi anggaran yang mencukupi agar bidan dapat menjalankan tugasnya dengan optimal," ungkapnya.

Bidan yang ditugaskan pada Polindes, katanya, harus mendapatkan pelatihan dan juga sumber daya yang memadai.

"Polindes perlu dilengkapi dengan listrik, air bersih, sanitasi, dan peralatan yang memadai untuk persalinan," pungkasnya.

Disamping itu, Surahman mengingatkan, jangan lupakan jasa para dukun beranak/paraji yang telah banyak membantu para ibu melahirkan, terutama yang berada di daerah-daerah pedalaman atau daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh puskesmas.

"Mereka perlu diberi perhatian dan diberi pelatihan agar bisa menjadi bagian dari Polindes yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan tugas para bidan yang ada di desa-desa," pungkas Surahman mengakhiri.



**Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat X

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pembangunan Desa perlu berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mengatur alokasi anggaran yang mencukupi agar bidan dapat menjalankan tugasnya dengan optimal,"

Peringatan Harganas

# Aleg PKS Ingatkan Peningkatan Stunting di Tengah Pandemi

KUTIPAN

Jakarta (29/06) --- Hari Keluarga Nasional (Harganas) diperingati setiap 29 Juni. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah agar mencermati peningkatan angka stunting di tengah pandemi COVID-19 akibat kurangnya suplay makanan bergizi seimbang.

"Pemerintah perlu mencermati agar tidak terjadi kekurangan suplay makanan bernutrisi dan bergizi seimbang yang dibutuhkan masyarakat dan keluarga. Kendala dalam distribusi bahan makanan dapat berdampak buruk pada upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia," kata Netty, Selasa (29/06).

Netty meminta pemerintah agar mengontrol dan mengendalikan distribusi bahan makanan ke seluruh negeri.

"Kebijakan pengetatan mobilitas untuk pengendalian pandemi dalam satu tahun

terakhir, pasti berdampak terhadap distribusi bahan makanan ke berbagai daerah, terutama daerah yang sulit dijangkau. Pastikan bahan makanan tersedia cukup di setiap daerah," ujarnya.

Politisi PKS ini juga meminta pemerintah agar membuat kebijakan ekonomi pro keluarga agar upaya penurunan angka stunting berhasil.

"Dampak pandemi telah membuat banyak keluarga Indonesia kehilangan penghasilan sehingga menurunkan kemampuan menyediakan pangan sehat

dan bergizi untuk anak-anak. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan ekonomi pro keluarga yang konkret guna menyelamatkan anak-anak Indonesia dari intaian gizi buruk dan stunting. Tidak boleh lagi terjadi, bansos untuk keluarga pra sejahtera malah dikorupsi," papar Netty.

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat (2008 - 2018) ini juga meminta pemerintah agar memerhatikan upaya pelayanan dasar, seperti posyandu, yang selama ini cukup berperan dalam memantau tumbuh kembang balita di banyak daerah.

"Pandemi membuat banyak posyandu tutup dan tidak memberikan pelayanan pada keluarga untuk memantau pertumbuhan berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) balita. Pemerintah harus menyasiasi bentuk pelayanan lain agar kita tidak panen gizi buruk dan stunting setelah pandemi," tambahnya.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini meminta agar peringatan Harganas yang mengangkat tema 'Keluarga Keren Cegah Stunting' dapat menjadi momentum agar pencegahan stunting bisa lebih optimal.

"Jadi peringatan Harganas sebagai momentum dalam mencegah stunting dengan langkah jelas dan konkret, bukan hanya kegiatan simbolik dan seremonial," tandasnya.

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Dampak pandemi telah membuat banyak keluarga Indonesia kehilangan penghasilan sehingga menurunkan kemampuan menyediakan pangan sehat dan bergizi untuk anak-anak. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan ekonomi pro keluarga yang konkret guna menyelamatkan anak-anak Indonesia dari intaian gizi buruk dan stunting. Tidak boleh lagi terjadi, bansos untuk keluarga pra sejahtera malah dikorupsi,"



image: istimeva

# Keluarga Benteng Terkuat Hadapi Pandemi Selamat Hari Keluarga Nasional

OLEH

**Hj. NEVI ZUIRINA**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

Hampir satu setengah tahun sejak pertama kali pandemi Covid-19 melanda dunia dan juga Indonesia tentu saja hal itu membawa dampak yang sangat buruk pada semua elemen masyarakat.

Pandemi yang masih menjadi tanda tanya besar kapan akan berakhir ini tentu saja akan terus dan harus dihadapi dengan kesabaran dan sikap yang keras untuk mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Awalnya kasus pertama Covid19 muncul, banyak orang di berbagai belahan tanah air tidak akan memperkirakan akan berdampak seburuk saat ini. Namun prediksi itu berbalik menjadi kabar menakutkan karena kian hari jumlah korban positif terkena virus semakin bertambah dan korban semakin banyak berjatuhan.

Tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan manusia, pandemi juga membawa dampak multi dimensi pada sistem dan tataatan global. Ekonomi seketika berubah menjadi kacau dan juga banyak perusahaan besar multinasional mengalami kegagalan serta bangkrut.

Namun demikian, dibalik dampak besar yang ditimbulkan pandemi tersebut, hal itu juga membawa berkah tersendiri karena situasi yang mencekam diawal awal pandemi serta

anjaran pemerintah untuk melarang warga keluar rumah dirasa cukup efektif untuk semakin merekatkan hubungan keluarga yang kian akrab dan gubub.

Keluarga terbukti menjadi ekosistem terkecil yang mampu mengatasi dampak buruk pandemi karena setiap orang menyadari bahwa dengan kembali ke lingkup terkecil (keluarga) menjadi sangat efektif dalam menjalankan fungsi kontrol dan edukasi kepada semua anggota keluarga mereka.

Hari ini, tepat tanggal 29 Juni 2021, bertepatan dengan pelaksanaan "Hari Keluarga Nasional" atau HARGANAS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 39 Tahun 2014, momentum ini harus dimanfaatkan guna kembali menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa keluarga sebagai sebuah lingkup masyarakat terkecil yang menjadi kekuatan dan modal utama dalam pembangunan manusia dan bangsa. Keluarga menjadi

# Keluarga Benteng Terkuat Hadapi Pandemi... (Tamat)

instrumen yang paling krusial dan sangat penting dalam penciptaan lingkungan kehidupan sosial seseorang yang lebih baik.

Peran penting kepala keluarga dalam hal ini dalam memberikan pendidikan dan pemahaman kepada anak-anak selaku anggota keluarga dalam menghadapi situasi pandemi sangat terasa dan harus dioptimalkan.

Keluarga yang harmonis dan dinamikanya terjaga terbukti menjadi benteng utama pertahanan dari bencana Covid-19 yang kian tidak terkendali dan memunculkan ketakutan akibat semakin

berkembangnya virus dengan varian baru.

Selain itu, perayaan Harganas 2021 hendaknya juga menjadi momentum bagi semua keluarga Indonesia untuk kembali bersama-sama menjaga diri dan anggota keluarga agar terhindar dari bahaya Covid-19.

Satu hal yang penting disadari dalam kondisi saat ini adalah, bahwa keluarga juga adalah institusi pendidikan yang paling efektif dalam memelihara moral dan perilaku setiap anggotanya. Keluarga juga merupakan lingkup pendidikan yang memiliki aspek kedekatan emosional yang sangat penting

dalam merawat kelangsungan hidup individu anggotanya.

Adanya ungkapan di tengah masyarakat bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seorang anak merupakan cerminan didikan di dalam lingkungan keluarganya tentu saja tidak bisa dinafikan dan diabaikan begitu saja.

Keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan kebiasaan dan pola tingkah laku, serta menanam nilai, agama, dan moral sesuai dengan usia dan kultur yang dianut. Untuk itu, peran kepala keluarga (Ayah dan Ibu) dalam mendidik anak sejak dini itu sangatlah penting.

Namun, peran orang tua dalam pembentukan karakter anak tidak bisa berjalan sendiri. Hal itu harus sejalan dengan pendidikan yang ditempuh dan dilalui anak diluar rumah.

Selain di lingkungan keluarga, seorang anak juga mendapatkan pendidikan lewat sekolah dan jalur non formal lainnya.

Dua hal itu harus sejalan dan terarah karena untuk mencapai suatu tujuan keluarga baik pola pendidikan menjadi kunci pembentukan karakter anak.

Hadirnya pandemi juga telah memberi efek positif pada sisi ketahanan keluarga. Pandemi yang memaksa setiap orang



image Istimewa

untuk berdamai diri di rumah telah membuat waktu setiap individu dalam keluarga menjadi lebih banyak untuk berinteraksi satu dengan lainnya yang tentu saja semakin meningkatkan kualitas hubungan antar sesama anggota keluarga.

Karena itu, ketahanan keluarga ini menjadi hal yang penting diperhatikan karena semakin baik ketahanannya, maka akan semakin baik cara

dan sikap keluarga menghadapi setiap perubahan yang ada. Keakraban yang terjalin dalam keluarga diyakini dapat mencegah Indonesia berada dalam situasi krisis sekaligus memastikan keluarga tetap tangguh.

Selamat Hari Keluarga Nasional tahun 2021 Bangun Komunikasi Akrab antar sesama anggota keluarga untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih baik.

## KUTIPAN

Satu hal yang penting disadari dalam kondisi saat ini adalah, bahwa keluarga juga adalah institusi pendidikan yang paling efektif dalam memelihara moral dan perilaku setiap anggotanya. Keluarga juga merupakan lingkup pendidikan yang memiliki aspek kedekatan emosional yang sangat penting dalam merawat kelangsungan hidup individu anggotanya.



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***